



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
DENGAN KETUA UMUM ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA  
INDONESIA (APBI-ICMA)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPRRI dengan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 19 Januari 2022
Waktu	: 10.20 s.d 12.51 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1. Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
Acara	: Mendapatkan Masukan tentang Pasokan/ Kebutuhan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
Hadir	: A. Anggota DPRRI: 40 dari 54 orang Anggota dengan rincian : 1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 10 dari 12 orang Anggota 1. Aria Bima 2. Adisatrya Suryo Sulisto 3. Rieke Diah Pitaloka 4. ST. Ananta Wahana, S.H.

5. Sonny T. Danapramita
6. I Nyoman Parta, S.H.
7. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
9. dr. H. Mufti A. N. Anam.
10. Ir. Haris Turino, M.Si, M.M.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
7 dari 8 orang Anggota

1. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
2. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
3. Doni Akbar, S.E.
4. Trifena M. Tinal, B.Sc.
5. Nusron Wahid
6. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
7. Dra. Hj. Haeny Relawaty Rini, W., M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)  
6 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
4. Khilmi
5. Ir. H. La Tinro La Tunrung
6. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M. M.B.A.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
4 dari 5 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
4. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
(F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. Ir. H. Nasim Khan
2. Tommy Kurniawan
3. Marwan Ja'far
4. Drs. H. Acep Adang Ruhiat, M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
2 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M,Si.
2. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
(F- PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin A.K
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Rafli

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)  
3 dari 5 orang Anggota

1. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
2. Daeng Muhammad, S.E.,M.Si.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., L.L.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(F-PPP)

1 dari 2 orang ANggota

1. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN:

1. Ketua Umum Asosisasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F-PDIP (ARIA BIMA/WAKIL KETUA):**

Dengan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia masa sidang ke III Sidang Tahun 2021-2022, Rabu 19 Januari 2022.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera buat kita semua,  
Shalom,  
Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

**Yang terhormat kawan-kawan anggota Komisi VI,  
Yang terhormat Pimpinan Komisi VI,**

Selamat datang kami ucapkan kepada, yang terhormat Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Bapak Hendra Sinadia, selamat pagi Pak. Kemudian selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat Deputy Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Ibu Kita Mahyarani

**DEPUTI DIREKTUR EKSEKUTIF APBI (MAHYARANI):**

Selamat pagi Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tentunya beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih dapat melakukan rapat dengar pendapat umum Komisi VI dengan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Dalam rangka menekan penyebaran pandemi Covid-19 maka rapat-rapat oleh kelengkapan anggota Dewan termasuk Komisi VI dan mitra kerja pemerintah tetap dilakukan dengan ketentuan rapat konsultasi pengganti Bamus B 15324 tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang tata cara rapat komisi atau badan pada masa tatanan *new normal* yang belum dicabut. Kehadiran fisik sangat kita batasi baik itu anggota DPR maupun mitra kerja. Namun, kehadiran secara virtual sudah kita atur dan sistem absen kita, kita gunakan dengan mengisi pada kolom *chat*-nya. Peliputan kita atur dengan TV Parlemen yang akan diliput oleh kawan-kawan di tim media, di media kita, di tim media parlemen dan pendalaman tetap kita lakukan, kita prioritaskan masing-masing juru bicara atau fraksi yang nanti akan menyampaikan pendalaman, itu pun juga kami batasi dalam waktu tertentu karena rapat hanya dibatasi maksimal satu jam setengah kalau toh diperpanjang bisa setengah jam.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dan para tamu undangan atas kesediaan waktu yang telah disediakan untuk hadir pada rapat dengar pendapat umum pada hari ini dan sesuai undangan yang telah kami sampaikan bahwa agenda rapat hari ini untuk mendengarkan.

Kita ingin mengetahui betul tidak hanya dari berbagai masukan media, tapi ingin mendengarkan penjelasan dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara,

terkait dengan kebutuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dalam forum rapat dengar pendapat umum di Komisi VI.

Dari yang kami terima, dari informasi-informasi yang ada bahwa krisis pasokan batu bara baik untuk pembangkit listrik milik Badan Usaha Milik Negara, maupun untuk pembangkit listrik swasta lainnya, bertolak belakang dengan kenyataan bahwa kita merupakan salah satu produsen batu bara terbesar. Ini yang kita ingin mendengarkan terdapat apakah terdapat kesalahan tata kelola industri batu bara nasional sehingga produksi yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri atau tepatnya mengalami satu kekhawatiran pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, yang salah satu penyebab kritisnya pasokan batu bara nasional tentunya tidak bisa tidak karena dipacu kenaikan harga batu bara nasional, yang diimbangi dengan kenaikan permintaan batu bara di pasar global yang disebabkan oleh berbagai hal, termasuk informasi mengenai pemulihan ekonomi yang begitu cepat dari negara-negara yang tengah memperbaiki kondisi pandemi Covid-19 atau beberapa informasi lainnya, karena kebutuhan batu bara terkait dengan musim dingin di beberapa negara sehingga membutuhkan pasokan untuk butuh energi primer untuk kebutuhan-kebutuhan pemanas.

Hal tersebut memicu pengusaha batu bara nasional akhirnya berusaha semaksimal mungkin mengalihkan pasokan ke pasar internasional mengingat keuntungan atau harga batu bara yang dihasilkan semakin besar, yang dulunya kita sempat *drop* dari berbagai produk primer atau komoditas lainnya. Sehingga, hal yang terkait dengan permasalahan kontrak batu bara antara PLN dan atau IPP yang tidak *sustain*, serta beberapa kendala wanprestasi yang dilakukan oleh pemasok juga turut berkontribusi terhadap kritisnya kondisi pasokan batu bara dalam negeri. Ini yang mengapa akhirnya kita Komisi VI mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dan untuk mengatasinya dari apa yang kita dapatkan juga dari informasi-informasi yang ada, akhirnya pemerintah telah memiliki beberapa instrumen yang salah satunya adalah ketentuan produsen batu bara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi nasional dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan instrumen pajak ekspor untuk mengurangi ekspor batu bara nasional. Secara khusus dalam menyikapi kondisi kritis pasokan batu bara untuk kebutuhan nasional pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menerbitkan ketentuan B160/MB.05/DJP/B/2021 tanggal 31 Desember yang tertuang di dalamnya adalah pelarangan perusahaan pertambangan batu bara untuk melakukan kegiatan ekspor batu bara. Ketentuan tersebut berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2022, namun demikian baru kurang daripada seminggu penerapan tersebut, peraturan tersebut telah dicabut karena selain mendapatkan protes dari beberapa negara pengimpor batu bara, dicabutnya ketentuan tersebut di bahwa akan berdampak pada pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri ini juga kita agak sedikit khawatir. Tapi saya mendengar bahwa informasi untuk memantau DMO ini sudah cukup tertib sehingga jaminan-jaminan ketersediaan untuk industri dasar bagi energi listrik nasional kita ini cukup bisa, cukup bisa menjamin adanya

ketersediaannya. Terkait dengan permasalahan pasokan batu bara yang telah kami sampaikan untuk konsumsi dalam negeri seperti yang telah diuraikan tadi, Komisi VI mengadakan rapat pada hari ini dengan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, yang tentunya tujuan dari RDPU ini adalah untuk menggali, mendalami, untuk mendapatkan data. Sebenarnya dari sisi kawan-kawan pengusaha itu seperti apa, karena kami juga mengundang dari sisi pemerintah sebagai regulator maupun dari sisi operator kita undang juga PLN di dalam Panja Energi kita.

Kita ingin mendapatkan masukan-masukan terkait dengan pasokan batu bara dan kebutuhan secara komprehensif untuk kita jadikan masukan-masukan itu adalah rekomendasi-rekomendasi yang lebih strategis. Tata kelola niaga batu bara nasional yang baik itu seperti apa. Kita juga tidak ingin menghambat karena naiknya batu bara di pasar internasional juga sebenarnya memberikan nilai tambah kita, tetapi bahwa segala kekayaan dan segala sumber daya alam dan mineral ini harus dikuasai negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya itu juga bagian tanggung jawab ideologis dan konstitusi kami. Maka untuk itu kami ingin mendapatkan suatu informasi yang transparan, yang profesional, dalam rangka keinginan kita di dalam mengambil keputusan-keputusan politik untuk mencegah terjadinya krisis seperti yang kita ketahui semua untuk pasokan kebutuhan dalam negeri.

Untuk mempersingkat waktu kami ingin mempersilakan kepada Saudara Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Sehingga, kami mendapatkan informasi langsung yang tentunya hasil RDPU nanti akan kita bawa di dalam rapat kerja dengan menteri-menteri terkait untuk mengambil satu keputusan-keputusan politik yang sifatnya permanen, sehingga keputusan itu bisa menjamin untuk tidak adanya hal-hal yang menyangkut situasi kiris, untuk kebutuhan rakyat dalam hal ini ada listrik itu sendiri.

Waktu dan tempat kami persilakan kepada Saudara Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia untuk menyampaikan paparannya, kami persilakan.

#### **DIREKTUR EKSEKUTIF APBI (HENDRA SINADIA):**

**Bapak Pimpinan Komisi VI yang terhormat,  
Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Komisi VI DPRRI,  
Yang terhormat teman-teman dari APBI, para peserta dari RDPU pada  
pagi hari ini,**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Pertama-tama permohonan maaf dari Ketua Umum kami, Pak Pandu sedang berada di luar negeri. Jadi, beliau menugaskan saya Hendra Sinadia,

Direktur Eksekutif, sehari-hari ditugaskan mengurus kantor asosiasi Pak. Jadi, tidak terafiliasi dengan perusahaan anggota, kami profesional dan pada pagi hari ini kami ditemani, saya ditemani beberapa teman dari APBI ada saya perkenalkan Bu Gita Mahyarani beliau Deputy Direktur Eksekutif APBI, kemudian sebelah kiri saya ada Pak Haryanto Damanik Sekjen APBI, kemudian Pak Anton Ketua Komite Marketing dan Logistik APBI, di sebelah kiri ujung Mas Marvin dari Sekretariat APBI, dan di ujung kanan Mba Linda dari Sekretariat APBI.

Terima kasih sekali atas undangan yang diberikan ke APBI, kami mengapresiasi undangan ini Pak Pimpinan. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kami dari asosiasi. Sebagai anak bangsa ya kita sama-sama punya kepentingan yang sama tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan. Batu bara adalah anugerah Allah buat Indonesia ya, kita diberkahi dengan komoditas batu bara, dan batu bara sebagai sumber energi termurah telah terbukti menjadi *backbone* bagi ketahanan energi nasional beberapa dekade dan diperkirakan hingga beberapa dekade ke depan. Bahkan, kalau dari segi perekonomian kontribusi dari komoditas batu bara juga tidak kecil, tadi disampaikan Pak Pimpinan. Bahkan kalau kita melihat di saat-saat krisis ya, krisis resesi yang terjadi karena Covid kemarin justru komoditas batu bara yang menjadi penyumbang bagi penerimaan negara yang signifikan. Kalau kita *flashback* lagi di 2008 waktu terjadi krisis global ekonomi keuangan juga kinerja dari sektor komoditas, termasuk batu bara juga menjadi salah satu yang menopang perekonomian kita sehingga tidak jatuh disaat krisis. Ini sedikit pengantar saya untuk sebelum memulai paparan.

Mohon izin Pak Pimpinan, Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Komisi VI yang terhormat, saya akan coba secara cepat untuk menyampaikan paparan. Jadi, pertama saya akan sampaikan ada paparan singkat kami dalam bentuk power point. Kemudian setelah itu kami akan secara cepat juga merespon atau memberikan tanggapan atas *outline*, pendalaman, pertanyaan dari Sekretariat Komisi VI yang kami baru dapat tadi malam. Kami akan sampaikan secara verbal dan untuk penyampaian pendalaman pertanyaan tadi saya akan dibantu oleh teman-teman dari APBI ada Pak Haryanto, ada Pak Anton juga, supaya nanti kita waktunya bisa lebih cukup untuk teman-teman dari Komisi VI mengajukan pertanyaan, untuk kita saling berdiskusi, tukar pikiran mencari solusi yang terbaik buat negara ini.

Nah, singkat saja paparan yang pertama kita lanjut di *slide* berikutnya. Mohon izin kami ingin perkenalkan APBI ICMA secara singkat. Kita sudah berusia 33 tahun, didirikan di tahun 89. Nah, mengenai keanggotaan Pak Pimpinan, kami jumlah anggotanya relatif tidak terlalu banyak ya, ada sekitar 72 perusahaan penunjang, kemudian ada perusahaan 60-an perusahaan penambang batu bara baik pemegang PKB2B, UPK, dan juga UP. Jadi, dari sisi jumlah perusahaan pertambangan yang bergabung menjadi anggota kami relatif jumlahnya tidak banyak, karena di luar sana ada lebih dari seribu perusahaan pertambangan, pemegang UP di luar anggota kami, tapi dari segi kontribusi terhadap produksi nasional itu kurang lebih, lebih dari 70% dihasilkan dari anggota kami dan untuk penerimaan negara dari PNPB itu

lebih dari 85% itu dari anggota-anggota APBI, dan kami sebagai mitra pemerintah senantiasa diundang oleh pemerintah dan juga dengan DPR untuk memberikan masukan mewakili industri batu bara secara keseluruhan, meskipun tugas dan tanggung jawab kami itu hanya terbatas kepada anggota kami yang bergabung.

Oke kita lanjut saja, nah berbicara mengenai pasokan batu bara dalam negeri tentu kita harus lihat secara makro bagaimana sumber daya dan cadangan batu bara nasional kita yang tadi saya sampaikan sebagai berkah dari yang kuasa, kita Yang Mahakuasa. Jumlah cadangan kita ada 38 miliar ton ini data dari Kementerian ESDM. Jika kita menggunakan tingkat produksi per tiap tahun 600juta kita bagi dari 38 miliar ton, secara teori kita masih memiliki umur batu bara lebih dari 60 tahun, itu pun tanpa dilakukan eksplorasi. Namun, tentu dengan perkembangan perubahan iklim dan Indonesia juga merupakan negara, salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris, pemanfaatan batu bara tentunya mungkin tidak akan terlalu lama ya, jadi akan secara bertahap nanti kedepannya ya itu tergantung dari arah kebijakan pemerintah.

Kita lanjut *slide* berikutnya, nah ini tabel data yang kami ambil juga dari Kementerian ESDM, ini kita petakan selama berapa tahun terakhir ini tingkat produksi batu bara yang warna biru, kemudian yang warna merah itu ekspor ya, dan kemudian yang warna hijau itu untuk dalam negeri ya yang biasa disebut DMO. Nah, kalau kita lihat ditabel ini beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan produksi tapi di zaman di sejak pandemi ada, ada di tahun 2020 ada penurunan tapi ke depannya di tahun 2021 ada peningkatan dan bahkan pemerintah menargetkan untuk tahun 2022 target produksi itu dinaikkan menjadi 663 ya, sementara realisasi yang 2021 ini sekitar 614. Kalau realisasi dari DMO, kalau kita buat hitungan presentasinya memang rata-rata ya di ini catatan kami ya di 2021 itu 21% ya, kemudian 2020 23%, 2019 22%. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut presentase ini untuk me-*refer* ke salah satu pertanyaan yang disampaikan di dalam *outline* yang kami terima.

Kita lanjut *slide* berikutnya, bagaimana realisasi konsumsi batu bara dalam negeri. Itu saja secara umum lebih dari 80% dari konsumsi batu bara dalam negeri itu diserap oleh kelistrikan ya, dalam hal ini PLN dan IPP, kemudian 20% atau kurang itu oleh industri dan nonkelistrikan yang mana yang terbesar adalah semen, diikuti kertas, juga ada pupuk, ada tekstil, ada *smelter* ya metalurgi, ada kertas, dan lain-lain. Di tahun 2021 berdasarkan data dari pemerintah itu jumlahnya sekitar 133 juta ton tapi kalau kita bandingkan dengan realisasi produksi tentu secara presentasinya akan berkurang karena realisasi produksinya cukup tinggi ya, yang di data yang kami terima.

Kita lanjut, nah ini salah satu isu yang, yang menjadi salah satu faktor kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memasok ke PLTU, ini yang menjadi salah satu faktor ya. Kalau kita ketahui dari jumlah produksi tadi itu sekitar 613 juta ton yang realisasi 2021. Nah, dari jumlah tersebut menurut data ya informasi dari Menteri ESDM yang dikutip di dimuat di



beberapa beberapa media beberapa hari yang lalu, jumlah dari 613 juta ton tersebut sekitar 240 juta ton produksi batu bara itu yang kualitasnya ya kualitas dalam hal ini kalorinya, kemudian ada kadar sulfurnya ya, kadar yang lain itu memenuhi atau sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PLN dan IPP.

Nah, sebagaimana kita ketahui suatu PLTU *buyer* atau desain PLTU itu disesuaikan dengan karakteristik batu bara kualitas batu bara yang tertentu. Jadi, sudah *fix* jadi PLTU Cilacap misalnya kalorinya sekian, kadar abunya sekian, kadar sulfurnya sekian dan itu diset seperti itu. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang bisa memenuhi 3 PLN yang ditetapkan pemerintah di bulan Maret tahun 2018 yaitu harga \$70 per ton ya, kita biasa pakai dengan istilah *kep 70* di *kep* ya. Nah, sebelum penetapan *kep 70* praktek yang berlaku dalam pasokan batu bara ke PLN itu menggunakan harga pasar dan sebagai informasi kewajiban DMO itu jauh sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam kontrak-kontrak ya perjanjian kontrak karya, kontrak batu pengusaha batu bara PKP2B itu di kontrak-kontraknya sudah juga menetapkan adanya kewajiban DMO jadi ini bukan, bukan hal yang baru ya. Nah, sebelum 2018 itu nyaris tidak terdengar adanya kehebohan ya karena secara umum perusahaan-perusahaan yang di, diminta untuk memasok ke PLN itu dicarikan, diminta oleh pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang memenuhi yang punya cadangan panjang ya diatas 5 tahun ya, karena yang penting bagaimana *sustainability* dari pasokan tersebut jadi pemerintah melihat perusahaan-perusahaan yang punya cadangan jangka panjang, kualitas yang dibutuhkan oleh PLN nah itulah perusahaan-perusahaan yang diminta oleh pemerintah, tentu dengan presentase ya, yang disesuaikan nah itu yang terjadi sebelum 2018. Nah, yang terjadi 2018 pada saat itu ada lonjakan harga yang tiba-tiba. Kalau kita berbicara mengenai harga tentu juga kita perlu melihat historikal dari harga komoditas itu. Pada saat di sebelum 2018 harga fluktuasi dan di situ kebanyakan harga malah dititik yang level rendah ya, yang level rendah tidak terjadi kehebohan seperti saat ini. Nah, pasca 2018 itu ditetapkan harga *kep 70* terjadi disparitas harga yang mana harga pasar di saat harga tinggi beberapa PLTU itu mengeluhkan adanya kesulitan, tapi sebaliknya di saat harga yang rendah dari pihak penambang juga mengalami kesulitan untuk memasok ke PLN ya sebagian yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban 25%. Nah, ini memang yang harus dicari bagaimana *balance*-nya ya karena kita ketahui harga komoditas itu sangat fluktuatif. Kalau kita lihat rata-rata lima tahun terakhir ini bahkan mungkin lebih banyak ya harga level yang rendah. Kita mungkin banyak cuma fakta melihat pada saat harga yang tinggi.

Nah, ini beberapa point ya ini saya kutip, saya dari keputusan pemerintah ya ini harga khusus batu bara tadi kami sudah sampaikan. Kemudian di point lima dulu di 2018 itu diperkenalkan satu skema bagi perusahaan yang tidak bisa memenuhi DMO itu bisa melakukan transfer ya kuota, jadi yang, yang, apa bagi perusahaan yang telah melebihi kewajibannya 25% ada akses, akses kuotanya itu dijual kepada perusahaan-perusahaan yang masih *short*, jadi terjadi perdagangan kuota pada saat itu.

Dan di tahun 2019 itu diterapkan sanksi ya jika perusahaan yang tidak melaksanakan apa DMO-nya termasuk tidak membeli kuota mereka *short* itu dikenakan sanksi di 2019 berupa pemotongan produksi. Sebagaimana kita ketahui waktu itu ada beberapa provinsi ya Kaltim dan Kalsel ya yang konsekuensinya produksinya bahkan dipotong melebihi 50%. Nah, ini yang membuat daerah-daerah tersebut mengajukan surat ke presiden agar dipertimbangkan, sehingga di 2020 sanksi berupa pemotongan produksi itu tidak diberlakukan, tapi pemerintah menerapkan yaitu sanksi kompensasi ya di 2020. Namun, di 2020 sebagaimana kita ketahui harga komoditas sangat rendah akibat pandemi sehingga sanksi menjadi tidak relevan dan itu yang kami usulkan ke pemerintah agar dipertimbangkan. Nah, di 2021 diterapkan ada sanksi namun implementasinya belum terlihat di lapangan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke kita lanjut saja kita supaya lebih cepat, oke saya kira ini kita *skip* aja dasar hukumnya sudah diatur. Nah, itu tadi saya sempat menyinggung mengenai kewajiban DMO, kemudian ada denda, ada sanksi ya, sanksi dan dana kompensasi bagi perusahaan untuk melaksanakan DMO-nya, yang mana untuk 2021 sanksi yang diterapkan itu belum diimplementasikan. Ini yang mungkin menjadi salah satu dasar pemerintah mengeluarkan larangan ekspor sementara ya yang kemarin berlaku efektif 1 Januari.

Kita lanjut, nah bagaimana ke depannya ini tentu kami sebagai bagian dari *stakeholders* yang merupakan mitra pemerintah. Ini beberapa masukan yang kita bisa menjadi bahan diskusi. Yang pertama tentu kita harus meminta ke pemerintah bagaimana memikirkan satu skema yang tepat, karena disparitas harga ini merupakan salah satu faktor yang membuat kondisi ini bisa terjadi dan kalau kita petakan dalam beberapa, beberapa kejadian kelangkaan pasokan yang terjadi beberapa waktu terakhir ada di Januari kemudian Agustus itu terjadi kelangkaan jika harga sedang dalam kondisi yang tinggi, kemudian juga pada waktu yang bersamaan ada kendala dari cuaca ya, kendala cuaca di mana ada kesulitan juga bagi kapal-kapal untuk melakukan pelayaran mengangkut batu bara ke PLTU yang dituju. Jadi, harga ini menjadi salah satu poin penting bagaimana skema yang akan diambil nanti ini paling tidak memperhatikan disparitas harga.

Namun, tentu apa pun yang akan diambil PLN dalam hal ini itu tidak dirugikan ya, jadi penambang juga perlu ada level *plan full* tapi PLN juga tidak dirugikan dan negara bisa memaksimalkan potensi dari komoditas batu bara. Nah, ini ada beberapa point tentu ada perlu pemantauan, ada presentase DMO yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan domestik yang *real* dan akurat, kemudian perlu ada perbaikan dari sisi PLN dalam hal ini ada fleksibilitas untuk mengambil batu bara di luar kualitas itu tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kualitas batu bara yang ada hanya 47% yang bisa diserap dan kebutuhan batu bara dibuat secara akurat, tepat, memperhatikan *safety*, komitmen sebagai tertuang dalam volume dan waktu pengiriman.

Nah, itu pandangan dari kami paparan singkat, namun izin Pak Pimpinan di beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI pendalaman kita akan sampaikan mungkin secara verbal, nanti saya bisa dibantu oleh Pak

Haryanto dan Pak Anton. Bisa tolong ditayangkan ada pertanyaan-pertanyaan di. Nah yang pertama untuk mempersingkat waktu pertanyaannya bacakan yang kami terima dari Sekretariat Komisi VI. Terkait dengan permasalahan krisis pasokan batu bara untuk konsumsi dalam negeri khususnya sebagai sumber energi pembangkit listrik. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, tadi Pak Pimpinan sudah menyampaikan. Menurut pendapat APB apa penyebab permasalahan tersebut.

Nah, tadi saya sudah sampaikan singkat di awal ya, salah satu kalau kita lihat historikal dari DMO tidak bisa dipungkiri disparitas harga merupakan salah satu faktor, tapi kami dalam kesempatan ini kami mau sampaikan bahwa tidak semua perusahaan-perusahaan itu tidak *comply* ya, ada banyak juga perusahaan yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan bahkan ada yang melebihi ya. Nah tadi disparitas harga salah satunya tentu. Kemudian hasil pengamatan kami kelangkaan sering terjadi jika lonjakan harga sangat tinggi, kemudian pada saat yang sama juga ada gangguan cuaca yang menyebabkan ada gangguan pengiriman pasokan batu bara, karena selain DMO tentu DMO ada kontrak dari masing-masing perusahaan untuk pengiriman batu bara, jadi kondisi cuaca juga berpengaruh terhadap itu dan faktor-faktor besaran presentase. Mungkin Pak Anton bisa menambahkan dan Pak Haryanto baru kita masuk ke pertanyaan kedua, silakan.

#### **SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Terima kasih Pak Hendra.

**Yang terhormat Pimpinan rapat dan yang terhormat Anggota Dewan Komisi VI,**

Menambahkan dari *statement* dari Pak Hendra terkait permasalahan krisis pasokan batu bara dalam negeri ini penyebabnya apa saja. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu isu penyebab pasokan ini krisis karena ada disparitas harga. Kenapa, tadinya beberapa mungkin yang *supplier* sudah berkontak dengan PLN atau IPP itu mereka tidak *perform* atau wanprestasi terhadap kontrak, sehingga mereka memilih untuk menjual batu baranya ke ekspor. Nah, itu salah satu sebenarnya isu utamanya juga kenapa ada pasokan. Nah, yang kita amati juga yang tapi nggak semata-mata disparitas ini menjadi permasalahan utama kenapa, ini kita mengamati bahwa ada permasalahan juga dari sisi pengadaan dari PLN ataupun IPP yang mana kalau dari data yang kami punya dari total 100% pengadaan batu bara oleh PLN dan IPP itu 20 sampai 30% pengadaannya melalui anak perusahaan PLN yaitu PLNBB. Itu total kalau kita bicara tadi 113 berarti ada sekitar kurang lebih 20 sampai 30 jutaan batu bara yang pengadaannya melalui *trader* batu bara yang dimiliki oleh anak perusahaan PLN.

Nah, yang menjadi isu apa sebenarnya di kasus ini. PLN batu bara ini ataupun mungkin PLN juga membeli batu bara dari nggak langsung ke *miner* ataupun produsen batu bara, tapi membeli dari *trader*. Yang terjadi adalah

*trader* ini membeli batu bara dari perusahaan-perusahaan batu bara yang kecil, yang kalau kita bicara *sustainability* produksinya ini nggak seperti yang perusahaan-perusahaan besar, sehingga misalnya tadi ada informasi cuaca atau misalnya ada disparitas harga mereka langsung mangkir aja ke nggak wanprestasi ke *trader*, *trader* otomatis nggak bisa *perform* ke PLN. Jadi, itu salah satu, dua isu juga yang, yang kedua yang melihat kita lihat, kita amati bahwa, strategi pengadaan batu bara ini menjadi catatan juga kenapa ada pasokan apa krisis pasokan disisi PLN atau IPP. Nah, kalau kita melihat, berkaca atau pun beberapa *case* untuk perusahaan-perusahaan anggota kita yang misalnya besar itu hampir tidak ada *case* mereka tidak *perform* terhadap kontrak, tapi kalau kita bicara ke *trader* sangat banyak gitu. Nah, mengenai berapa presentase kegagalan wanprestasi itu mungkin dari sisi PLN yang bisa memberikan klarifikasinya, tapi itu pengamatan yang kita lihat yang kedua.

Terus kemudian yang ketiga adalah apa, mengenai ketentuan tadi pengadaan mengenai dari siapa sumbernya, yang ketiga itu mengenai ketentuan pengiriman. Jadi, kalau pengiriman batu bara itu, kalau kontrak dengan PLN atau IPP itu biasanya ada menggunakan *shipping terms* itu CIF ataupun FOB. Nah, yang terjadi adalah kalau ketentuannya FOB itu PLN menjemput batu bara ke produsen. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lihat di beberapa di bulan Agustus kemarin ataupun di Desember kemarin itu mereka PLN ini kesulitan untuk melakukan pengadaan kapal. Pertanyaannya kenapa, kalau kita lihat data juga ada *statement* juga dari INSA misalnya itu nyampaikan bahwa ya isunya masalah pembayaran, terus kemudian harga yang mungkin kurang kompetitif dan segala macam gitu kan, nanti mungkin INSA bisa mengklarifikasi itu tapi *statement* pres lirisnya sudah ada juga. Jadi, tapi kalau misalnya itu diubah jadi CIF dalam hal ini produsen yang mengadakan kapal mengirimkan langsung ke PLTU. Nah, ini *shipping company* atau perusahaan kapal ini nggak ada masalah sebenarnya kenapa, ya kalau misalnya dari sisi kita kan *terms*-nya itu misalnya 30 hari pembayaran ya kita biasanya kan nggak jauh-jauh. Nah, kalau kita lihat PLN *statement* dari Direksi PLN juga sampaikan kan selama ini isunya pembayaran itu bisa sampai empat bulan gitu. Nah, itu isu ketiga mengenai logistik kenapa menjadi pasokan apa krisis pasokan ini bisa terjadi.

Jadi, pertama tadi mengenai disparitas harga, kedua, tapi nggak semata-mata bahwa ini menjadi masalahnya sepanjang kalau misalnya tadi pengadaan yang dilakukan oleh PLN IPP ini bisa langsung ke produsen tanpa harus lewat *trader*. Nah, yang ketiga mengenai logistik yang mana apakah nanti ini proses pengadaan logistik dari sisi PLN ini bisa apa namanya lebih di *improve* dalam hal ini sehingga *shipping company* ini nggak *reluctant* untuk berkontak dengan PLN. Nah, yang mana selama ini juga untuk pengadaan kapal itu juga PLN nggak langsung tapi melalui anak perusahaan yang namanya BAG atau pun Bahtera Adhiguna, ya semacam ya perusahaan kapal broker gitu ya kurang lebih gitu.

Mungkin itu tambahan jadi ada tiga, tiga tambahan mungkin, dari Pak Anton silakan menambahkan Pak. Terima kasih.

**KETUA KOMITE MARKETING DAN LOGISTIK APBI (ANTON):**

Izin Ketua.

Jadi, mungkin saya cuma menambahkan aja, *background* dari pendirian PLNBB pada saat itu yang kita dengar adalah untuk menjembatani perbedaan kalori, misalnya PLNBB bisa melakukan *blending* dan melakukan *supply* sendiri, paling nggak menjembatani perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kalori yang sesuai dengan PLN. Jadi, mereka bisa mendistribusikan juga langsung. Juga dari segi kuantiti atau segi volume, PLN itu berkontrak harus lima tahun pada saat itu. Nah, untuk teman-teman produksinya atau apa cadangannya tidak mencapai lima tahun itu bisa jembatani oleh PLBB dan lain-lain Pak. Jadi, juga dari segi pembayaran sebetulnya juga PLNBB bisa lebih cepat dari PLN walaupun di situ ada komision resmi dari PLBB yang diterapkan itu berbeda-beda 10 sampai 30 sen, tapi kita bisa mendapatkan manfaat karena kita bisa tetap men-*supply* dan mendapat pembayaran lebih cepat.

Mungkin itu Pak tambahannya.

**DIREKTUR EKSEKUTIF APBI (HENDRA SINADIA):**

Terima kasih Pak Anton.

Mungkin Bu Gita sebelum kita serahkan ke teman-teman komisi, Bu Gita oke mungkin udah.

Mohon izin Pak Pimpinan mungkin itu dari kami jadi mungkin kita maksimalkan waktu untuk teman-teman dari Komisi VI untuk pendalaman.

Terima kasih Pak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jadi, mengenai hal yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Pak Hendra Sinadia terkait dengan berbagai persoalan yang kita lihat selama ini, karena banyak hal penyebab kenapa sampai ada kepanikan di dalam negeri terkait dengan kebutuhan baru batu bara untuk pasokan domestik, khususnya untuk kebutuhan PLN tadi sudah disampaikan. Nanti kita lanjutkan pendalaman kita lanjutkan penjelasannya setelah pendalaman dari kawan-kawan.

Saya ucapkan terima kasih atas paparannya dan kami akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan pendalaman.

Sebelah kiri dulu silakan Pak Daeng.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Iya terima kasih Pimpinan.

Terima kasih kepada APBI ICMA, kebetulan yang hadir Pak Direktur Eksekutif ya dengan jajarannya.

Sebetulnya tadi paparan tadi menarik buat saya. Jadi, yang selama ini kami anggap di berita itu kan yang ramai adalah bahwa pengusaha batu bara tidak mau melaksanakan DMO terhadap PLN ataupun beberapa industri dalam negeri, karena ada disparitas harga, harga di luar negeri lebih mahal sehingga mereka memprioritaskan untuk dilakukan ekspor. Tapi ketika dapat penjelasan dari Bapak barusan, saya mengambil kesimpulan, jadi saya ambil kesimpulan duluan ini bahwa memang persoalannya adalah profesionalisme manajemen PLN berkaitan dengan pengadaan batu bara, karena apa, tadi Bapak jelaskan, saya ingin klarifikasi ini penjelasan Bapak. Jadi, sebetulnya persoalannya bukan hanya disparitas ansi berkaitan disparitas harga tapi berkaitan juga persoalan bagaimana PLN melakukan pengadaan terhadap batu bara sehingga ketersediaan mereka *ready* atau siap dalam produksi PLN-nya. Tadi pertanyaannya adalah satu Pak, jadi PLN selama ini pengadaannya tidak langsung kepada produsen batu bara tapi melalui *trader* kan atau pihak ketiga.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Nggak semua Pak, dari data kami itu sekitar 20 sampai 30% itu melalui *trader* ataupun PLNBB, terus 60 sampai 70% itu melalui divisi batu baranya PLN dan 10% sisanya lain-lain Pak.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Yang,

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi yang menjadi catatan kami sebenarnya lebih juga ke yang kalau melalui *trader* Pak.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Melalui *trader* sekitar 20 30% boleh sambil dialog ya Pak Pimpinan, 20 30% melalui *trader* ya, artinya melalui pihak ketiga?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

20 30% itu sebenarnya dari PLNBB Pak, PLNBB ini anak perusahaan PLN *trading* batu bara. Nah *trading* batu bara ini bisa ngambil langsung ke produsen langsung, bisa juga dari *trader* batu bara gitu.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Nggak yang, yang Bapak-bapak paham selama ini langsung ke produsen batu baranya atau mereka melalui *trader* kebanyakan?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi, kan misalnya kita tadi bicara produksi kebutuhan PLN 2021 112 juta, 112 juta ini dari 112, 20 sampai 30% itu pengadaannya itu melalui PLNBB Pak, *trader* batu baranya perusahaan *trader* batu bara, anak perusahaannya PLN.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Iya PLN menggunakan anak perusahaannya dibentuk untuk menjadi *trader*-nya

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Membeli batu bara iya. Nah *trader* PLNBB ini berarti kan kalau kita 20 sampai 30% itu sekitar 30 juta ya kurang lebih

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Pak saya mau

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

30 juta itu dia belinya bisa dari produsen langsung, bisa juga dari *trader* batu bara lagi Pak misalnya *trader* batu bara lokal. *Trader* batu bara lokal ini dia kan ngumpul-ngumpulin ini Pak dari perusahaan-perusahaan kecil. Nah ini yang seringnya yang kita ketahui itu yang nggak *perform* ke PLBB-nya, ketika dia nggak *perform* ke PLNBB dia kan nggak *perform* juga ke PLNBB, nggak akan *perform* juga ke PLN Pak kurang lebih gitu.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Oh iya, jadi artinya memang persoalannya adalah polarisasi pengadaan yang dibikin oleh PLN itu artinya memang tidak bagus Pak, karena buat saya kan itu harusnya sudah dihitung secara manajerial mereka. Apalagi tadi Bapak bilang dengan pengadaan misalnya sebetulnya batu bara ini kan kalori yang dibutuhkan oleh PLN itu sekitar 4 apa 4.700 sampai kisaran segitu kan Pak ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Betul Pak, 4.200 sampai 5.000 kurang lebih.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Ya sekitar kisaran masuk kategori bawah atau sedang itu Pak? Bawah sampai sedang ya.

Terus Bapak tadi juga jelaskan berkaitan dengan pengadaan. Kalau mereka perusahaan-perusahaan pengadaan itu tidak *perform* artinya memang perusahaan-perusahaan bukan besar ya, sehingga ketika kondisi cuaca dan lain-lain mereka kesulitan kan untuk distribusi terhadap batu baranya. Ya kan artinya ini kan *decision making* pengambilan keputusan ini dilakukan oleh PLN, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan batu bara akan produksi listriknya kan, kondisinya kan seperti itu Pak. Terus tadi pengadaan kapalnya lewat Bahtera Adhiguna, Bapak maksud tadi ini perusahaan *broker* maksudnya apa itu Pak?

**KETUA KOMITE MARKETING DAN LOGISTIK APBI (ANTON):**

Iya jadi PLN sendiri punya anak perusahaan Pak, untuk *memprofite* kapal-kapal yang akan *mendeliver* ke PLN, jadi diutamakan menggunakan BAG dan itu sudah dilakukan tetapi tidak semua juga Pak jadi ada kontrak-kontrak yang panjang memang sudah di plot dari awal. Misalnya untuk perusahaan besar IPP yang sudah mempunyai *supply* itu batu bara dan kapal udah rutin itu aman. Nah, untuk yang *spot* yang masuk ke PLNBB dan melalui BAG itu kadang-kadang juga karena kecil dia mereka berharap bisa fleksibel pindah-pindah. BAG sendiri sangat membantu Pak sebetulnya. Hanya dalam situasi *supply* yang tidak pasti keadaan apa cuaca seperti ini itu yang membuat mereka agak sulit melakukan pengadaannya.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Nggak maksud saya gini Pak, ketika Bapak diundang ke sini kami ingin eksplora lah ingin tahu sebetulnya, karena Komisi VI ini kan mitranya PLN supaya ke depan ada perbaikan kinerja PLN Pak. Ini kita ke aksi korporasi PLN-nya nanti, jadi ketika Bapak sampaikan ke kami nggak usah ditutup-tutupin. Persoalannya kaya apa si sebetulnya, pengadaan batu bara itu sehingga kok kita ini sumber daya alam batu baranya luar biasa, bahkan eksportir mungkin luar biasa anugrah yang Bapak bilang tadi anugrah Tuhan terhadap republik ini tapi ada gonjang-ganjing kita nggak punya batu bara untuk PLN kita sendiri, untuk nasional kita. Ada ketentuan yang sudah dituangkan pemerintah dengan DMO dan lain-lain kenapa *actionnya* tidak bisa jalan, kan ada persoalan di situ Pak. Jadi, supaya sikap-sikap yang diambil oleh Komisi VI ke depan artinya kita bisa memperbaiki BUMN kita, PLN kita sehingga lebih baik itu saja Pak catatan saya, supaya Bapak sampaikan saja ke kami.

Terima kasih.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**



Setuju Pak jadi ya mungkin saya tambahkan sedikit dari PLNBB. Kalau beli melalui *trader* agak sulit bagi Pemerintah *mengenforce* DMO-nya karena memang tidak ada itu yang menyebabkan kesulitan minerba sendiri untuk ini gimana ini, karena mereka bilang *trader is trader* jadi selesai Pak kontraknya jadi itu sebetulnya paling sulit Pak. Nah, yang dilakukan pada saat kritis seperti itu, itu jadinya membebani DMO yang sudah lebih membebani perusahaan yang sudah lebih DMO-nya. Jadi, hal itu kan jadi tambahan beban lagi, beban lagi, beban lagi Pak, untuk perusahaan yang sudah melakukan DMO.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Pak saya mau nanya dikit aja. Kalau melalui *trader* dengan langsung ke produsen batu bara itu selisihnya berapa si Pak?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi, kalau *trader* ini kan Pak kalau misalnya kita nggak bisa bilang ada pasti berapa selisihnya, karena *trader* ini juga kadang melakukan *blending* Pak. Jadi, misalnya dia berkon, contoh *trader A*, *trader A* ini *mensupply* ke PLNBB, kontraknya misalnya satu bars dulu gitu ya Pak, satu bars ukuran 300 pit dengan kapasitas 7 ribu sampai 8 ribu matriks ton. Nah, dia kan harus beli lagi ini *trader A* ini batu bara untuk bisa jual ke PLNBB. Nah ketika dia beli mungkin dia belinya dari PT. A dan PT. B jadi nggak satu perusahaan. Jadi misalnya 4ribu dari PT. A, 4 ribu dari PT. B dengan spek misalnya yang berbeda, yang satu mungkin spek rendah, satu yang speknya agak tinggi sehingga kalau di *blend* itu sesuai dengan spek yang akan dijual ke PLNBB. Nah itu berapa harga-harganya nggak ada pastinya Pak kurang lebih gitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Sedikit lagi Pak.

Berarti selama ini kalau melalui *trading* melalui *trader* tadi, *trader* tidak terikat dengan DMO ketentuan pemerintah kan ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Tidak.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):**

Itu persoalannya juga kan, oh ada di penambang. Jadi, harusnya kan memang PLN untuk mengamankan *stock* batu bara mereka harusnya ketentuan ini diperbaiki kan, harusnya langsung ke penambang sehingga

DMO itu mampu dilaksanakan oleh penambang sebagai pemasok PLN. Itu catatan saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

Kami persilakan selanjutnya Pak Rudi Hartono Bangun.

**FP-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota,  
Yang saya hormati Ketua Umum dan seluruh jajaran,**

Baik Pak Ketua Umum atau Direktur Eksekutif tadi saya hanya ingin memberi saran tentang dan pertanyaan Pak gitu. Jadi, saya baca dari paparan Bapak ini kan ada 138 perusahaan selama ini beroperasi mengelola penambang batu bara. Yang saya juga mau tanya kontribusinya 138 perusahaan ini kepada negara dalam bentuk PNBPN Pendapatan Negara Bukan Pajak dan kontribusinya ke daerah misalnya kabupaten setempat yang jalannya rusak, yang jalannya hancur dilalui mobil-mobil tambang itu bagaimana Pak, berapa angkanya gitu. Ini Bapak kan hanya bicara 2020 kontribusinya Bapak bilang 34 triliun gitu kan, tapi ini yang nambang ini 130an perusahaan ini Pak sudah makmur sejak puluhan tahun, Bapak kan tahu kan gitu. Jadi, Bapak tadi bilang ini adalah sumber daya alam yang diberikan Allah kepada kita yang dimiliki negara gitu kan. Jadi, yang saya ingin tanya ini namanya sumber daya alam anugrah Allah ini kan biasanya Pak biasanya kalau kita orang beragama itu untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat Pak rakyat maksudnya. Jadi, yang Bapak sampaikan sudah pas tapi makmur dan maslahatannya dimana ini paparannya ini, di kabupaten mana Bapak sampaikan juga di sini ini.

Bapak misalnya nambang di Kaltim di mananya gitu kan, kami buat begini Pak sudah maju daerah sana harusnya begitu kan Pak, oke itu satu masalah Pak. Kemudian yang kedua kami ini dari kami sebagai DPR Pak wakil rakyat ini kan sudut pandangnya melihatnya kepentingan rakyat Pak, kepentingan bangsa dan negara Pak. Jadi, Bapak dan jajaran dan para pengusaha persero itu juga harus sadar Pak ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Pak, paham tidak dapat diperbaharui kan Pak sama seperti minyak di Arab sana, ketika habis tidak bisa ditimbulkan lagi Pak, tidak bisa ditanam lagi kan. Beda dengan misalnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui sawit CPO gitu, itu habis kita tanam lagi gitu Pak. Jadi yang Bapak gali karena dia tidak dapat diperbaharui harus ada lah Pak manfaatnya Pak, Bapak harus sosialisasikan sama anggota Bapak itu. Bagaimana masyarakat ekonomi, masyarakat sekitar Pak, nggak ada di sini Pak paparan Bapak ini. Misalnya kami buat beasiswa, ada 100 ribu manusia yang jadi

sarjana nggak ada Pak, ini Bapak untung ceritanya untung rugi saja ini, untung buat saya untung sekian. Ini sekarang di luar negeri bos saya, begitu ini Pak.

Kemudian yang tadi yang pertanyaan juga Bapak teman saya Pak Daeng mengenai PLN Pak. Saya ingin tahu harga yang dijual ekspor itu berapa Pak, berapa USD, kalau Bapak tadi sebut hanya kami jual Pertamina 70 Pak, kami jual PLN \$70, kami jual PLN \$70. Yang ke luar negeri ini Pak yang masalah ini berapa, kan ini yang membuat malas anggota Bapak *nyupply* kan, ini kan *problem* utama kan Pak karena ada disparitas Bapak bilang perbedaan harga yang tinggi kan, berapa harganya bedanya Pak. Jelaskan Pak jadi kita bisa tahu solusi kan Pak, karena begini Pak kita berpikir Pak, saya ingin ngajak Bapak berpikir sama kawan-kawan nanti yang punya tambang yang kaya raya itu. Jika PLN satu bulan ini mematikan jaringan listriknya Pak Jawa, Kalimantan, Bali Bapak punya uang puluhan miliar ya kan, nggak guna Pak, HP pada jaringannya putus mati, lampu Bapak gelap. Nggak ada Pak Bapak tumpuk uang itu di bawah bantal atau di brangkas ga guna Pak gitu. Jadi, harus ada ini Pak istilah ya apa, apa Pimpinan namanya itu, pengertianlah Pak. Ya kan adalah alokasi khusus untuk bangsa negara ini PLN lah itu Pak, janganlah merebutkan harga, Bapak kumpulkan asosiasi itu anggota Bapak pakai otak kita bilang kalau mati ini setahun kita juga nggak bisa ke mana-mana begitu. Kasih pemahaman itu Pak. Kalau cerita Pak Daeng kan sudah teknis ke mana-mana, sudah saya pusing itu kalau itu Pak tapi yang cerita yang ini tadi gitu.

Nah itu jadi itu Pak *problem*-nya kan hanya karena uang ini USD-nya tinggi gitu, tapi pemahaman, pengertianlah kita sama-sama Pak, demi rakyat, bangsa, negara, demi kemakmuran Pak. Kalau diputus Pak nggak bisa operasi Pak kalau PLN ini mutuskan jaringan pada nggak bisa hubungan, telpon nggak bisa, putus semua tambang itu Pak operasinya. Nah, coba itu Bapak kasih pemahaman sama kawan-kawan gitu Pak.

Itu dari saya, terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam*

Setelah Pak Rudi kami persilakan Ibu Nevi.

**F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):**

**Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,  
Bapak, Ibu dari APBI,**

Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak, Ibu dari APBI bahwa PLN mengalami kelangkaan pasokan batu bara dan membutuhkan

sebanyak 20 juta ton batu bara untuk mengamankan 20 pembangkit listrik tenaga uap miliknya sebagai langkah untuk menghindari pemadaman 10 juta pelanggan listrik PLN. Masalah DMO ini sudah masalah klasik selalu kejadiannya seperti ini. Kami ingin memastikan kepada APBI apakah selama ini mengalami keluhan dalam pelaksanaan kontrak kerja sebagai pemasok batu bara ke PLN, itu yang pertama, lalu yang kedua sanksi apa yang diberikan kepada pemasok yang tidak mau melaksanakan kewajibannya DMO ke PLN.

Tadi sudah disampaikan dalam pemaparan Bapak bahwa perlu mekanisme, pemantauan atau *monitoring* pemenuhan DMO secara berkala atau setiap triwulan, apakah dari APBI ini ada semacam satgas Pak, jadi yang tidak memenuhi DMO ini itu seberapa pemasok, sehingga kita harus memastikan semua penambang batu bara ini memenuhi kewajiban pertama adalah memenuhi DMO ke PLN.

Lalu terus juga mohon dibuka datanya perusahaan batu bara mana saja yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%, ini jelas sudah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang. Tadi disampaikan juga bahwa kalau untuk tahun 2020-2021 tidak ada lagi pemberlakuan, diganti ya kompensasi perusahaan yang tidak dapat memenuhi dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi DMO dan sanksi tambahan berupa pengurangan produksi sampai dengan pencabutan izin bagi yang melanggar kontrak pasokan dalam negeri. Nah ini bagaimana untuk memantaunya Pak, karena kan memang kita paling utama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Lalu terus Pak dari APBI perlu membuka terus komunikasi dengan PLN khususnya PLN Batu Bara agar PLN Batu Bara tidak melakukan kontrak melalui *trader* yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan. Bahwa memang walaupun itu 20-30% tapi bila itu mengganggu perjalanan pemenuhan DMO ke PLN tentu kami inginkan tidak lewat *trader*, tapi langsung kepada penambang.

Itu saja Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Bu Nevi.  
Lanjut ke sebelah kanan Pak Amin.

**F-PKS (AMIN AK, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati,**

Maaf saya tadi terlambat jadi macetnya luar biasa.

Kemarin kami bikin rilis memang apa ya terutama mendengar *statement* Pak LPP itu ya yang menyayangkan panjangnya jalur ya pengadaan dari PLN ini terkait dengan batu bara. Jadi, kalau Bapak tadi jelasin ada PLN kan punya anak PT. PLN Batu Bara, kemudian membentuk anak lagi ya yang untuk pengadaannya itu ya. PLN Batu Bara berarti punya anak lagi yang khusus untuk mengadakan atau yang PLN Batu Bara itu sendiri yang mengadakan pembelian itu Pak.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi PLN Batu Bara itu salah satu anak perusahaan PLN Pak yang mengadakan *supply* batu bara Pak buat PLN.

**F-PKS (AMIN AK, M.M.):**

Jadi langsung PLN Batu Bara itu ya yang mengadakan ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Iya, dia akan berkontrak dengan produsen batu bara atau pun ke *trader* batu bara.

**F-PKS (AMIN AK, M.M.):**

Oh *trader* batu bara oh iya ya berarti tadi saya, saya salah tangkap saya pikir habis itu masih membentuk anak lagi gitu nggak ya.

Iya saya kira memang *problem*-nya disitu Pak, tadi saya kira sudah banyak penjelasan yang disampaikan oleh Pak Daeng, juga Pak Bangun pertanyaan ya, pertanyaan sekaligus penjelasan, dan tentu kami sebagai wakil rakyat ingin minta komitmenlah dari Bapak-bapak yang tadi Pak Bangun juga saya kira sudah sangat tegas menyampaikan agar kita berpikir tentu kesejahteraan bersama sesuai dengan Undang-undang Dasar yang mengamatkan kepada kita semua, Undang-undang Dasar bahwa ini kan sumber-sumber daya strategis yang memang pemanfaatannya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Mungkin melalui forum ini kami ingin menyampaikan harapan itu, tentu yang terkait dengan BUMN nanti kita ya akan sampaikanlah agar PLN ini yang sudah berat bebannya, kemudian PLN Batu Bara yang mengadakan dan membuat kontrak dengan Bapak-bapak ini ya para produsen atau penambang itu jangan menambah jalur sehingga menambah berat beban bagi BUMN kita gitu, karena tadi mereka melalui *trader* atau main-main sehingga ya *cost*-nya menjadi mahal atau menjadi langka malah persediaan batu bara ini sehingga terjadi krisis seperti yang sekarang menjadi isu nasional yang luar biasa.

Saya kira dari saya itu harapan saja Pak Pimpinan, Mas Bima.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan Pak Ananta

**F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Dari virtual apakah ada?

**F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):**

Bapak, Ibu dari APBI, tadi disampaikan bahwa DMO tidak bisa terpenuhi 25% itu, saya pikir itu tidak hanya membuat persoalan bagi PLN tetapi juga bagi industri-industri lainnya itu, mestinya seperti itu. Ada dua hal yang ingin saya ketahui, yang pertama itu berdasarkan data Kementerian ESDM itu dari 486 perusahaan batu bara meskipun itu bukan anggota dari Bapak-bapak sekalian. Dari 302 perusahaan itu tidak menyampaikan RKP itu yang membuat itu izinnnya di apa dicabut gitu. Nah, kira-kira kendalanya apa itu untuk tidak susah untuk membuat RKAP itu, itu yang pertama.

Yang kedua pernah kami mendapatkan info atau melihat TV itu banyak batu bara-batu bara ilegal itu salah satunya salah satunya itu karena ada, ada istilahnya apa namanya, apa pembajakan, pembajakan batu bara di perairan-perairan itu dengan kapal-kapal kelontok itu yang kecil itu.

Nah, saya yakin di samping itu di perairan mungkin juga terjadi pembajakan-pembajakan batu bara itu terjadi di apa namanya di darat itu ya. Nah, saya ingin mendapatkan cerita itu karena DMO tidak terpenuhi apakah juga salah satunya tidak hanya persoalan harga, *trader*, mungkin juga masalah-masalah begal istilahnya tadi begal-begal batu bara yang ada di perairan maupun di darat, dan menurut kononnya begal-begal itu juga di-*backup* oleh pengusaha-pengusaha batu, batu bara itu kan. Jadi, ini juga mungkin salah satu kenapa DMO itu tidak tercapai kira-kira.

Dua hal itu saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak-bapak sekalian. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Khilmi.

**F-P.GERINDRA (KHILMI):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terima kasih.

**Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota Komisi VI,  
Yang saya hormati Ketua Umum APBI, ICMA beserta jajaran,**

Jadi, setelah saya mendengar dari paparan Pak Ketua Umum tadi sebetulnya kesalahan ini bukan terletak pada APBI atau ICMA secara keseluruhan Pak ya, tapi mungkin ada kesalahan di PLN juga di anak perusahaan itu yang di mana kontrak-kontrak itu yang dilakukan oleh anak perusahaan itu bukan ke sektor penambang langsung tapi melalui *trader-trader*. Jadi, saya berharap ke depan dari 138 perusahaan di mana 66 perusahaan batu bara anggota utama dan 72 perusahaan penunjang untuk anggota pendamping ini bisa berkontribusi untuk kepentingan nasional Pak harapan saya, karena di dalam Undang-undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat (2) itu kan yang berhubungan dengan hidup orang banyak ini kan harusnya dikuasai oleh negara tapi untuk kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya, tapi sekarang banyak tambang-tambang yang berhubungan dengan hidup orang banyak ini yang juga dikuasai oleh swasta Pak. Dan harapan kami ini kan untuk kepentingan masyarakat banyak, itu yang 25% lah itu DMO itu ya harusnya jangan sampai terjadi tidak ada *pen-supply*-nya di dalam negeri ini. Karena apa, energi ini kan berhubungan dengan lapangan kerja juga Pak, walaupun lapangan sumber daya manusia yang terserap di tambang itu ada 100 ribu orang, tapi kan yang di yang membutuhkan kebutuhan energi ini kan lebih dari puluhan juta orang gitu loh Pak.

Jadi, harapan kami ini, inilah yang lebih dipentingkan apalagi masalah tenaga listrik untuk rumah tangga itu kan hampir 270 juta orang ini bersandar di tempat Bapak ini kan gitu karena energi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, saya berharap kedepan demi kepentingan bersama jangan sampai Bapak di tengah jalan terus izin ekspor diberhentikan.

Itu harapan kami itu sangat besar dari Bapak-bapak ini karena kebutuhan energi adalah kebutuhan pokok selain makanan, IT, teknologi itu sumber dari semuanya ya energi ini kalau nggak ada energi ya semua mati, nggak ada yang akan bisa jalan di Indonesia ini. Jadi, harapan kami nanti akan mempertanyakan juga Pak tentang kesulitan-kesulitan Bapak yang hadapi, tentang pembayaran, tentang angkutan yang kalau dilakukan oleh PLN kadang-kadang Bapak kan barang sudah ada *slot* kapal tidak ada, itu akan saya tanyakan karena ini ada hubungannya dengan pasokan batu bara ini.

Jadi, harapan kami Pak sebagai anggota DPRRI yang mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu jangan sampai ini terjadi lagi Pak, jangan sampai Bapak juga dirugikan negara lain akan protes karena gara-gara juga kesalahan dari anggota Bapak gitu loh, dan saya berharap Pak ini *trader-trader* ini kan kami dikasih daftar siapa aja yang main *trading* di, di PLN ini orang yang nggak punya tambang tapi masuk ke PLN, ada apa kan gitu di perusahaan anak perusahaan batu bara ini kan gitu. Karena apa, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau nanti *trader* itu udah kontrak tapi penambang itu tidak mau *supply* kan jadi bahaya juga Pak, ini kan tidak boleh berhenti.

Jadi, saya berharap nanti masukan dari Ketua APBI ICMA ini untuk ngasih masukan Pak ke kita *trader* yang masuk ke PLN itu siapa saja perusahaan apa aja, karena saya lihat tambang batu bara itu saya pikir IUP-nya itu banyak taunya cuma segini. Jadi, apakah, saya kemarin kan juga lihat-lihat IUP yang ada di Aceh itu kan orang itu menguasai IUP tapi tidak dimanfaatkan gitu loh, itu kan Bapak harus bisa lapor ke kita supaya anggota DPR kan nanti kita bisa menyampaikan ke, ke mana itu ke Kementerian ESDM kan gitu Pak. Ini orang ini kan cuma pegang surat aja terus surat ini mau ditawarkan ke investor-investor mana gitu kan, berapa harga yang akan dijual dia gitu loh. Ini saya dengar Pak yang kaya begitu-begitu jadi dia punya IUP di Aceh itu yang kualitasnya mungkin baguslah tapi ini nggak ditambah sampai sekarang, tapi dia udah menguasai hampir 300 ribu hektar gitu tapi terdiri dari beberapa IUP, ini satu orang jadi ini menguasai tambang nikel, tambang voksit, tambang batu bara tapi dia ini cuma makelar apa itu punya IUP aja tapi dia itu maunya IUP ini nanti dicarikan investor, investor yang nambang dia tinggal nerima, ini kan mendingan saya kasih ke Bapak kan kalau saya jadi pucuk Pimpinan yang memberi apa itu bisa memberi IUP kan mendingan kaya Bapak-bapak ini punya tanggung jawab yang lebih tinggi kepada kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan kan kalau memang Bapak ini sudah bisa memberi DMO sebesar 25%, daripada orang ini punya IUP nggak dikerjain tapi ditawarkan ke mana-mana.

Itu aja Pak hampir dia itu keseluruhan IUP itu punya 75 IUP dari batu bara, bauksit, nikel, semuanya dia punya. Ya itu ada Bapak-bapak mungkin tahulah yang di Aceh itu yang 300 ribu hektar itu miliknya siapa tapi kan sampai sekarang kan nggak dikerjakan gitu loh. Jadi, saya berharap mendingan Kementerian ESDM ini ngasih ke anggota-anggota yang mau mengeluarkan modal yang mau menanggung resiko rugi untuk menambah kan gitu. Jangan sampai orang yang punya surat segini, sama RKAP, dibawa ke mana-mana, nawarin kemana-mana terus dia tidak mau beresiko untuk rugi dalam hal ini kan gitu.

Jadi, saya berharap nanti kita akan panggil PLN dalam hal tentang kesulitan-kesulitan Bapak ini akan kita sampaikan gitu loh. Jadi, harapan kami DMO yang 25% ini Bapak penuhlah untuk kepentingan masyarakat banyak karena di Undang-Undang Dasar ini udah tercantum gitu loh Pak, bahwa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara tapi kan kita ini masih ada yang bisa dikasih ke swasta, tapi swastanya itu kan juga harus apa itu bisa memikirkan kepentingan masyarakat banyak.

Itu aja dari saya Pak Ketua harapan kami sekali lagi DMO yang 25% ini bisa dipenuhi oleh penambang batu bara. Sekian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam*



Kanan kosong, langsung aja Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Terima kasih Pimpinan, Mas Bimo.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Teman-teman anggota Komisi VI yang saya hormati,  
Dan juga Ketua Umum dari APBI ICMA bersama beserta dengan jajaran,**

Singkat saja Pak tadi sudah banyak secara teknis yang ditanyakan oleh kawan-kawan dari Komisi VI. Cuma kalau kita bisa ke *slide* 6 di situ ada penjelasan ya mungkin bisa jelaskan lebih, lebih terang lagi karena ini (rekaman terputus) PLN IPP hanya 240 juta ton namun yang bisa diserap PLN hanya 112,13 juta ton atau 47%. Nah, dalam hal ini mungkin pertanyaan saya Pak, sepengetahuan teman-teman dari APBI ini sebetulnya berapa besar sih kebutuhan batu bara yang dibutuhkan oleh PLN ini, karena di sini disebutkan hanya 47% yang diserap sementara ada 240 juta ton yang sebetulnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PLN, karena ini juga berkaitan dengan usulan perbaikan tata kelola dari APBI ICMA di *slide* nomor 10 yaitu di situ APBI mengusulkan bahwa besaran presentase DMO perlu disesuaikan dengan kebutuhan domestik yang *real* atau akurat. Lalu di poin keempat juga usulan itu untuk PLN bisa lebih fleksibel, fleksibel *sorry*, fleksibel untuk mengambil batu bara di luar kualitas. Ini juga berkaitan dengan tadi pernyataan atau penjelasan dari teman-teman APBI ICMA bahwa dikatakan berulang-ulang di sini ada yang tidak *perform*, *supplier* dan IPP, *supplier* dengan IPP dan PLN tidak *perform*. Nah, dalam hal ini bisa sebetulnya dijelaskan lagi lebih jelas, sebetulnya yang tidak *perform* ini kan tadi disebutkan selalu apa *trader*-nya gitu, bagaimana dengan sisi dari PLN itu sendiri, karena kan kita tahu PLN ini kan pihak yang membeli batu bara gitu. Jadi yang, yang apakah PLN juga di sini ada masalah dengan apa namanya dengan kontrak jual beli ini dengan para *trader* atau dengan para penambang, karena juga tadi disebutkan bahwa ini mengenai masalah pembayaran juga bisa sampai empat bulan atau pun lebih lama daripada itu, kan ini juga sebetulnya terkadang bisa menjadi masalah. Saya yakin bukan hanya mengenai masalah harga saja, kalau kita berbisnis terkadang harga tidak masalah sebetulnya walaupun harga lebih rendah sedikit katakanlah namun yang penting ada kepastian bagi para pengusaha tersebut.

Jadi, mohon ini jelaskan oleh teman-teman APBI dan ICMA mengenai masalah performa dan juga tadi di *slide* 6 yang saya tanyakan. Itu saja dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**KETUA RAPAT:**

Masih ada? Silakan Pak Tommy.

**F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):**

Terima kasih

**Pimpinan yang saya hormati, beserta dengan rekan-rekan Komisi VI,  
Dan juga yang saya hormati Ketua Umum APBI dan ICMA beserta  
dengan seluruh jajarannya,**

Terima kasih Bapak tadi atas materi yang telah disampaikan kepada kami, tentunya hari ini kami mendapatkan pandangan umum secara umum dari Bapak-bapak sekalian terkait dengan permasalahan PLN di kemarin-kemarin itu ya dan juga pemberhentian ekspor. Ini sebenarnya kalau kita petakan lebih detail lagi, permasalahan kekurangan batu bara ini kan bukan cuma dari PLN tapi juga ada pabrik pupuk juga kalau kita bicara konteks BUMN juga ada pabrik semen dan lain-lainnya. Karena saya mendapatkan laporan juga dan kemarin sebelum rapat ini saya coba cari-cari informasi memang kendalanya adalah apa namanya perusahaan-perusahaan ini lebih senang ekspor karena harganya dua kali lipat daripada pemenuhan dalam negeri. Nah, saya kira mungkin harapan dari APBI ICMA ini tentang apa namanya mekanisme atau pemantauan terkait dengan kepatuhan DMO ini, ini saya kira menjadi solusi yang, yang menurut saya harus kita putuskan Pimpinan, karena memang permasalahannya adalah dipengawasan itu sendiri dari pemenuhan DMO.

Kalau saya lihat dari peraturan yang ada di dalam paparan materi ini itu peraturannya sudah sangat ketat sekali bahkan yang diganti kalau tidak memenuhi DMO itu akan mendapatkan larangan ekspor. Saya kira memang hanya terkait dengan masalah pengawasan dan kalau memang diperlukan untuk perluasan apa namanya kebijakan terkait dengan bukan hanya tambang yang diwajibkan DMO tapi juga seluruh yang beraktifitas dalam kegiatan batu bara itu juga diwajibkan.

Saya kira ini bisa menjadi satu apa namanya solusi bagi kita semua, karena kemarin saya berbicara dengan salah satu apa yang pabrik yang membutuhkan batu bara Pak. Ini mereka khawatir karena gas juga sedang masalah saat ini, batu bara juga sedang masalah lebih banyak maunya ekspor daripada dalam negeri. Mereka bahkan sampai *hopeless*, kemungkinan Pak ini pabrik kita mesinnya mungkin ada yang kita matikan, kalau kita matikan ini akan berdampak terhadap produksi kebutuhan nasional yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, saya kira kalau misalkan masalah ini merembet bukan hanya ke cuma listrik tapi juga konsumsi yang lainnya, ini kan bisa menjadi satu masalah nasional yang besar menurut saya. Jadi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pandangan umumnya, atas materi-materinya, ayo kita sama-sama cari solusi.



Saya kira Pimpinan perlu rekomendasi dari kita untuk terkait dengan pengawasan kepatuhan DMO ini harus betul-betul dibuat apakah membentuk satgas atau yang lainnya.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam*

Apakah masih ada virtual? Tidak ada. Sekarang pukul 12 kita mau akhiri sekitar 12.30. Dari meja Pimpinan, dari virtual apakah ada? Iya kalau begitu dari saya sendiri.

Terkait dengan peristiwa ini tentunya kita di DPR Komisi VI khususnya, dimana mitra kerja kita adalah Kementerian BUMN yang di dalamnya adalah industri dan PLN sendiri, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi. Melihat bahwa ini cukup membanggakan Pak. Saya baru terbelalak bahwa luar biasa ini energi yang kemarin saya agak mulai skeptis EBT, EBT, EBT yang digembar-gemborkan, kemudian ada ratifikasi yang segera mengharuskan 25% energi ini tidak berbasis bahan dasar energi fosil yang mulai kita juga terus diharuskan untuk memberikan jumlah energi EBT ini, kalau tidak salah sekitar 23%. Ternyata negara-negara yang kemarin menekan kita untuk bagaimana ada konversi energi kita ini sekarang justru membutuhkan batu bara yang demikian pesat ya, karena ternyata energi terbarukan ini tidak bisa mencukupi kebutuhan akan panasnya suhu yang dia butuhkan dengan energi-energi yang terbarukan dan akhirnya kembali ke fosil.

Kemudian industri-industri saya juga baru terbelalak betapa kita sebenarnya menjadi subyek untuk hidup tidaknya industri-industri itu setelah kita tutup ekspor kita. Saya ngajak berpikir asosiasi, ya kalau mau pengen aman industrinya investasi *dong* ke sini, batu baranya banyak, energinya banyak gitu loh. Terkait juga narasi besar, Pemerintahan Jokowi dengan membangun daya saing, dengan keinginan kita masuk dalam era industri 4.0 dengan beberapa infrastruktur yang telah dibangun. Ini yang saya melihat berkahnya dinaikan Pak tidak hanya jualan tapi berkahnya harus menjadikan bahwa Indonesia ini menjadi sumber energi primer yang dicari para pelaku-pelaku bisnis, yang ini seharusnya menjadi modal dasar kita untuk membangun industri nasional, untuk membangun daya saing bangsa ini yang, yang kita kadang kesulitan mereka untuk masuk menanamkan modalnya ke kita. Jadi ternyata Indonesia cukup memberikan kenyamanan untuk adanya energi sebagai sumber daya untuk adanya pengembangan industri. Ini sedikit saya mulai membalik-balik betapa kita mempunyai energi dasar untuk adanya energi pembangkit listrik yang menjadikan berbagai produk industri-industri besar di luar setelah ada kasus penutupan kemarin, selain dari pihak *trader* ya yang nanti mau kita soroti.

Kemudian mengenai persoalan utama yang perlu kita kaji ulang adalah bagaimana komoditas strategi ini untuk membangun industri dalam negeri yang sembari kita ingin menarik investasi, dilakukan berbagai cara kita untuk batu bara ini bisa dihilirisasi. Saya pengen ngajak asosiasi untuk berpikir satu *step* tidak hanya jualan tapi juga dihilirisasi, ini penting dibicarakan di asosiasi.

Mengenai DMO saya berharap asosiasi jangan kendor. Saya tadi disampaikan banyak Pak yang belum menyerahkan DMO-nya. Regulasinya ada saya lihat diperbarui dari DMO yang pertahun, DMO perbulan, sekarang DMO per hari untuk memantau pasokan kita. Kalau itu buat Komisi VI tidak bisa ditawar dan yang melanggar saya berharap dari asosiasi juga ikut mengawasi bagaimana penindakan tegas terhadap, terhadap perusahaan-perusahaan yang memang tidak memenuhi setorannya untuk DMO-nya.

Kemarin saksi financial itu tidak, tidak mujarab Pak karena penaltinya masih bisa dimainkan dengan harga fluktuasi luar ya. Jadi, saya berharap ada bagaimana tidak hanya sekedar pemerintah yang mengancam tapi asosiasi juga ikut membantu, apakah sampai perlu cabut izin, ya kalau kelihatannya pelanggaran konstitusi untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dan itu tidak dilakukan dan hanya untuk kemakmuran segelintir pengusaha dengan hanya keinginan untuk membesar kepentingan modalnya yang mengabaikan kepentingan rakyat, itu secara ideologi, secara moral sebagai warga bangsa memang sudah dibawah standar untuk tidak hanya mendapatkan sanksi finansial Pak, apakah mungkin dengan pencabutan. Itu yang saya ingin tanyakan pada asosiasi untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasannya karena kemarin dengan adanya keputusan tutup ekspor ini, ini ya secara konstitusional benar Pak, secara ideologis benar, tapi bagaimana dengan *trading-trading* yang tiba-tiba kita tutup, itu cukup menjadi catatan dari beberapa negara tentang sikap-sikap semacam ini. Saya sebagai DPR sebagai seorang politik memberikan apresiasi, sikap langkah Pemerintah menutup ekspor demi kepentingan rakyat yang jujur tadi, kekhawatiran adanya devisa batu bara sebagai *supply* energi dasar di PLN ini sangat mengkhawatirkan. Ini yang mau saya tanyakan bagaimana asosiasi ikut mengawasi dan bagaimana sanksi itu lebih bisa ditingkatkan ya. Dan izin ekspor sementara ini informasinya sudah dicabut ya dan saya melihat geliat para pengusaha waktu itu begitu ekstrimnya, tapi kalau buat politisi, buat DPR ya harus itu Pak yang harus dilakukan, daripada kebutuhan ini devisa dan akan terjadi beberapa hal yang terkait dengan kepentingan PLN. PLN dan *off taker* batu bara dalam negeri tentunya harus memperbaiki *forecasting* nya Pak. Saya sepakat tadi *demand* nya *planning*-nya seperti apa, tentunya yang lebih akurat Pak. Sebenarnya PLN itu berapa si kebutuhannya, termasuk tadi yang disampaikan kalori-kalori yang ada itu ya, ini nanti kita akan pakai rapat ya.

Saya itu dititipi banyak teman pengen masuk di PLN ini sulit sekali prosedurnya ya kan, tapi kok tiba-tiba kurang kaget juga. Nanti yang mau kita pakai dalam rapat panja energi yang dipimpin Pak Demer dan saya pengen proyeksi jangka panjangnya Pak, PLN ini tidak bisa ada kekurangan batu

bara itu yang Bapak harus catat dan kalau toh harga luar naik PLN pun tidak bisa menaikkan harga tarif listriknya itu karena untuk rakyat ya kan. Batu bara ini milik rakyat Pak jujur saja, maka kebutuhan rakyat harus kita penuhi dulu baru nanti kebutuhan korporasi atau kepentingan korporasi secara ideologis begitu. Kemudian perusahaan negara yang juga yang *leading* sektor dari Komisi VI ini menyangkut masalah listrik rakyat tadi saya katakan super prioritas Pak, itu yang harus menjadi *value share value* dari kawan-kawan APBI ini. Dah kamu mau ekspor apa pun *iki wee* rakyat yang kita jual kita hanya selisih lebihnya aja ya kan. Syukur-syukur yang Bapak-bapak ekspor itu ngerti bahwa yang paling aman itu ya industri di sini dengan ketersediaan bahan dasar industri listrik ini yang dia butuhkan, karena kita butuh mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Dan tentunya kami tidak bisa membebani rakyat baik kalau listrik itu mati maupun kalau harga batu bara itu diserahkan pasar.

Defisit akses rakyat untuk mendapatkan harga listrik murah dengan batu bara murah yang mungkin hanya separo atau sepertiga harga luar itulah defisit akses itu butuh kita untuk mempertahankan secara politik gunanya kita dipilih disini Pak. Ini karena apa kita mengundang tapi ini zamannya sudah tidak lagi hanya menggunakan kewenangan yang sangat represif untuk menekan ekspor kita, kita ingin cari *win-win solution*, *win-win solution* yang seperti apa, Pasal 33 tetap dijaga, bagaimana kemakmuran rakyat ini akibat bumi dan air dimanfaatkan sebesar-besarnya, tetapi ekspor pun masih bisa jalan Pak ini yang kita harapkan. Apakah bentuk *haggling* cara yang bisa kita pakai seperti beli satu tahun tapi harga butuh sekarang itu apa dimungkinkan itu kan, sehingga kaya bursa komoditas yang harusnya Bappebti lakukan ini. Saya juga akan minta ke Menteri Perdagangan untuk Bappebti dalam situasi kaya gini harus bekerja seperti apa, tanggung jawabnya apa, hubungannya apa Bappebti dengan asosiasi pengusaha batu bara untuk menjaga *stock* nasional seperti hanya juga yang baru kita bicarakan di Komisi VI ini mengenai CPO yang hari ini kita juga akan ketemu.

Jadi, kita ingin tetap melindungi kepentingan rakyat, kepentingan konsumen PLN ya, tapi juga kita ingin investasi kawan-kawan pengusaha penambang ini sebagai produsen tetap *win-win solution*. Menurut Bapak *haggling* atau lindungan nilai harga buat PLN dalam waktu tertentu yang itu bisa menstabilkan kebutuhan dan harga pasokan itu dimungkinkan nggak caranya dan butuh keputusan politik apa itu kan gitu supaya cari *win-win* kalau tidak *win-win* saya pakai Pasal 33 selesai Pak, tapi irisannya seperti apa sebenarnya yang harga maupun pasokan terjamin, tetapi kawan-kawan eksportir juga bisa tetap jalan, ini yang kita butuh, tidak menang-menangan tapi juga kemudian dengan harga yang demikian besar, kemudian tidak orientasi untuk mendapatkan keuntungan besar dari sumber daya alam yang harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat ini ditinggalkan, ini yang mengapa kita butuh masukan hari ini yang nanti kita akan gunakan dalam rapat kerja di internal dengan PLN maupun dengan Kementerian BUMN.

Saya kira itu Pak dari pendalaman kita, silakan direspon

**F-PG (DONI AKBAR, S.E.):**

Pimpinan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Dan kalau mungkin kalau kesimpulan kita akan bikin kesimpulan.

**F-PG (DONI AKBAR, S.E.):**

Pimpinan interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Oh *monggo* Pak.

**F-PG (DONI AKBAR, S.E.):**

Maaf terlambat boleh izin sedikit Pimpinan?

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PG (DONI AKBAR, S.E.):**

Terima kasih sebelumnya

**Pimpinan dan rekan-rekan-rekan Anggota Komisi VI,**

Maaf saya terlambat tadi agak macet di jalan Pak, belum punya helikopter masalahnya.

**Juga yang saya hormati teman-teman dari APBI dan ICMA,**

Kalau boleh saya sedikit interaktif Pak, ya saya mau tanyakan kan Bapak sampaikan itu kebutuhan untuk DMO yang diserap oleh PLN itu adalah batu bara dengan kalori sedang Pak ya. Seandainya di luar kalori sedang itu apakah tidak memungkinkan untuk diolah agar PLN itu bisa menggunakannya Pak, mungkin tidak? di luar yang kalori sedang itu, itu yang pertama.

Yang kedua, ini kan jadi gini, karena saya *basic*-nya juga swasta dulu juga ada teman-teman dari asosiasi ini juga beberapa saya kenal, yang pengen saya tanyakan gini. Kita ini sedang sulit Pak, gimanapun juga PLN ini kan adalah Badan Usaha Milik Negara yang harus kita *support* juga. Apakah tidak memungkinkan dengan harga jual itu yang 25% itu dipenuhi, teman-teman dari pengusaha ini bisa ditutupi dengan selisih atau distitusi dari ekspornya. Mungkin memang bukan rugi tapi keuntungannya berkurang

Pimpinan. Jadi, dia tetap dapat keuntungan tapi kewajiban dia sebagai usaha untuk rakyat Indonesia ini bisa tetap dipenuhi.

Terus tadi saya sempat dengar juga ada teman saya Pak Husen tanya terkait masalah jangka waktu pembayaran. Apakah iya apabila PLN itu memberikan pembayaran tepat waktu itu akan membantu Bapak-bapak dari pengusaha batu bara ini. Misalnya mereka *schedule, on schedule* pembayarannya, apakah iya itu memberikan bantuan yang signifikan terhadap teman-teman sekalian.

Mungkin itu saja Pimpinan dari saya. Terima kasih, selamat siang.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**DIREKTUR EKSEKUTIF APBI (HENDRA SINADIA):**

Iya mohon izin.  
Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Komisi VI yang terhormat,**

Mohon izin kita akan coba dengan waktu yang singkat ini untuk menjawab, merespon, menanggapi *point by point* dari yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum masuk itu mungkin langsung saya tadi dari Pak Pimpinan mengenai energi batu bara ya sebagai sumber energi primer yang tadi disampaikan. Memang betul peran strategis ya apalagi di era *climate changes* yang kami lihat ini batu bara perannya makin strategis saya lihat di beberapa negara Tiongkok juga ya yang apa Inggris pun yang tadinya mau meninggalkan sekarang kembali ke batu bara. Jadi memang batu bara termasuk Jepang ya negara yang terkenal dengan kebersihannya dengan lingkungan yang bersih toh juga masih memerlukan batu bara. Jadi, ini komoditas strategis kita yang harusnya ini bisa di, di apa dimanfaatkan untuk kedepan dan terutama di era transisi energi, kami sepakat memang ke depan ini peran teknologi untuk pengembangan batu bara yang lebih bersih ya ini jadi kunci untuk keberlanjutan pengembangan batu bara.

Dan kalau berbicara mengenai hilirisasi anggota kami ya salah satunya ya PT. Bukit Asam juga sudah memulai ya Pak, rencananya ada kader diakhir Januari ya ini *grand breaking* ya di Sumatera Selatan ya oleh Bapak Presiden ya. Jadi ini akan menjadi semacam *pilot* ya bagi perusahaan-perusahaan nanti melihat keekonomiannya seperti apa dan saya kira beberapa anggota kami juga sudah mulai melakukan studi ya studi untuk berinvestasi di hilirisasi batu bara Pak. Jadi, proses sekarang sudah mulai berjalan tapi tentunya yang banyak kendala-kendala. Nah, kita lihat ini PT Bukit Asam sudah akan memulai jadi trennya akan kesana ini Pak Pimpinan.

5

Berbicara juga sedikit mengenai *climate* perusahaan-perusahaan juga sudah mulai, mulai ada beberapa yang mulai diversifikasi ya, ada yang bahkan berinvestasi membuat subsidiari untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Jadi, trennya udah ke sana terutama perusahaan-perusahaan yang punya cadangan yang panjang. Nah, tadi menarik dari Pak Riyanto tadi terima kasih koreksinya Pak, kami terima itu koreksi dari Bapak tadi, tapi memang tidak sempat untuk menyampaikan mengenai bagaimana kontribusi dari sektor pertambangan ke masyarakat, ke negara. Kami memang karena kepentingan waktu yang singkat jadi *straight to the point* ke soal-soal isu batu bara. Nah, tepat sekali apa yang disampaikan ke Pimpinan tadi bahwa batu bara ini adalah milik rakyat semuanya Pak dan kami pelaku usaha tentunya adalah kontraktor dari pemerintah, jadi kita harus mematuhi apa yang diputuskan oleh pemerintah termasuk ya untuk bagaimana manfaat dari pertambangan batu bara ini bisa dirasakan sebesar-besar oleh rakyat. Mekanismenya tentu salah satu melalui kewajiban perusahaan untuk membayar pajak dan nonpajak ke negara, yang mana itu diatur oleh pemerintah besaran tarif pajak ya PPH, PPM, kemudian juga ada nonpajak ya PNPB yang tarif royalti itu besarnya sudah diatur pemerintah. Adapun pembagiannya ke daerah itu diatur oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi, kita serahkan ke pemerintah dalam mengatur bagaimana mekanisme atau distribusi dari manfaat yang dibayarkan oleh perusahaan pertambangan melalui pajak dan nonpajak.

Manfaat langsung tentu perusahaan-perusahaan juga wajib untuk melaksanakan CSR atau kalau nomenklaturnya di industri pertambangan PPM (Pemberdayaan dan Pengelolaan Masyarakat), yang mana setiap perusahaan punya program-program yang dilaksanakan di setiap-setiap perusahaan. Tentu kami dari asosiasi kalau kami memantau dari, dari asosiasi kami yang jumlahnya hanya terbatas sekitar 60-an perusahaan yang berkontribusi terhadap 70% dari kontribusi produksi nasional dan dari sisi PMBP-nya itu lebih dari 80% ya kontribusi PMBP subsektor batu bara dari anggota-anggota kami. Kami cukup, cukup bangga dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Salah satu indikator kalau kita menggunakan indikator pemeringkatan yang dibuat oleh pemerintah yaitu *proper* yang dikeluarkan setiap tahun oleh Kementerian LHK itu di berapa tahun berturut-turut terakhir 2021 empat atau lima ya, empat perusahaan batu bara mendapatkan peringkat emas, yang mana di pemeringkatan tersebut juga menilai salah satu indikatornya adalah pelaksanaan PPM tersebut. Jadi, berdasarkan itu kami cukup apa apresiasi langkah-langkah oleh perusahaan tapi tentu kalau kita berbicara manfaat yang dirasakan pada dasarnya masih perlu panjang ya, ini yang harus jadi PR kita bersama karena kita harus berbicara secara global ada ribuan perusahaan pertambangan batu bara yang masing-masing punya kewajiban.

Nah, ini mohon izin nanti ada beberapa poin kita bahas per poin dari apa yang kami rangkum dari teman-teman Komisi VI, tapi sebelum, jadi antara lain tadi ada mengenai kualitas batu bara ya bagaimana serapan dari PLN, kemudian juga ada yang menanyakan mengenai kontrak, ada juga



sanksi, kemudian juga bagaimana pemantauan, nanti juga ada mengenai harga, tadi juga Pak Pimpinan usulkan. Jadi, kita coba bahas *point by point*, tapi sebelum kita masuk itu kita ingin menegaskan bahwa berbicara mengenai kelancaran pasokan batu bara ke dalam negeri kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi PLN ataupun penambang. Ini sejatinya adalah suatu ekosistem ya, ini suatu ekosistem besar ya disini yang mana dinaungi oleh satu regulasi yang diberlakukan pada semua pihak.

Di dalam ekosistem ini selain tadi penambang, PLN, ada regulasi yang mengatur, ada *trader* juga disitu juga ada aspek pengangkutan logistik. Jadi, itu semua harus apa pembenahannya memang harus secara menyeluruh. Jadi, kami tidak di paparan kami bukan semata-mata apa melihat dari ada sisi yang diperbaiki oleh PLN tapi tentunya dari sisi penambang ya juga perlu diperbaiki dan salah satunya yang menjadi sorotan dari penambang adalah mengenai kualitas yang tidak bisa diserap ya hanya 47% dari pasokan.

Nah nanti saya dibantu teman-teman untuk menjawab beberapa poin mungkin kita mulai dari kualitas dulu ya, Pak Haryanto, Pak Anton juga menambahkan nanti.

Makasih Pak Pimpinan.

#### **SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Iya terkait bicara tentang pertanyaan tadi ada beberapa juga mungkin bisa kita ini kebutuhan PLN ya Pak. Jadi, kebutuhan PLN itu di 2 ribu PLN listrik Pak ya untuk kepentingan umum itu di 2021 itu sebesar 112 juta. Nah, ini di *slide* kita tadi ada pertanyaan juga ini ada ambigu atau kurang jelas di *slide* nomor 6. Jadi, kalau kita lihat produksi di 2021 itu sebesar 613 juta matrik ton, 613 juta ini sebenarnya yang dari 613 ini yang dibutuhkan PLN itu hanya 112 juta. Nah, kemudian namun 112 juta ini sebenarnya kan yang sesuai dengan spek PLN kan. Nah, yang dari 613 ini sebenarnya berapa si yang sesuai dengan spek PLN, nah dari data kita itu, itu ada total 240 juta Pak. Jadi, 47% dari 240 juta itu hanya 112 juta yang dibutuhkan PLN. Tadi Pak Pimpinan rapat sampaikan ada teman Bapak yang mau masuk *supply* PLN tapi nggak ada tapi sekarang PLN kesusahan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa, data ini *demand* nya itu akan lebih, lebih sedikit daripada *supply*nya Pak. Jadi, yang dari total 613 juta, 240 juta itu yang sesuai dengan spek PLN tapi hanya 112 juta yang bisa diserap oleh PLN. Jadi, ada *demand* yang lebih kecil daripada *supply*. Nah, kalau ditanya *demand* lebih kecil daripada *supply* pasti ada orang yang nggak akan *perform* sama DMO Pak, kenapa, ya dia mau masuk jualan ke PLN nggak bisa Pak. Bukan karena dia nggak mau begitu, dia mau jualan tadi kan teman Bapak bilang saya mau ke PLN, nggak bisa jualan Pak karena ya cuma segitu yang dibutuhin PLN Pak. Belum lagi yang bicara yang nggak sesuai spek Pak, tadi kan 613 Pak, 240 sesuai spek berarti ada 400 yang nggak sesuai spek, mau jual ke PLN gimana Pak nggak akan kebeli PLN.

**KETUA RAPAT:**

Belum ada harga yang

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Iya ini, ini normal Pak, ini normal Pak kita bicara yang normal kita nggak bicara harga dulu ini. Jadi, kalau tadi 612, 600 ya 13 juta ton produksi 2021 yang sesuai spek PLN 240, nggak sesuai itu ada sekitar 400, ya 300 sekian berarti ya. Jadi, yang sesuai ini aja mau jual ke PLN nggak bisa Pak, karena cuma butuhnya 100, 200, PLN bilang nggak bisa saya udah, udah *sold out* apa udah beli udah *full*-lah ininya ya udah kalau normal, tapi kondisinya kan ini data yang valid Pak jadi kebutuhan di PLN di 2021 113, 112. Jadi, *demand*-nya ini lebih sedikit dari *supply*.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak.

Situasi harga berubah di pasar, global terutama. Yang normal *mensupply* PLN selama ini kenapa kemudian tidak *mensupply*. Kan dia sudah punya kontrak.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Itu yang tadi sebelumnya kita sempat jelaskan. Jadi, kalau ditanya tadi ada dari Dewan, anggota Dewan yang terhormat nanya siapa yang *nggak perform* ya kita mungkin perlu dipertanyakan ke PLN kali Pak, yang *nggak perform* siapa. Misalnya yang *nggak perform* PLNBB, berapa persen, PLNBB ini beli dari siapa, yang *nggak perform* dari PLNBB siapa Pak.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Pak tanya boleh Pak, boleh Pak? Pak izin Pak.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Iya.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Pak tadi agak lebih luas Pak ya.

Dari 612 juta ton itu kan kalau menurut data Bapak di *slide* 5 yang sesuai yang disalurkan lewat DMO itu 133,04 cuma memang paling dari 133 itu 112-nya digunakan untuk PLN. *Which is* artinya ada sekitar 19 juta yang digunakan untuk non PLN, ada semen, ada pupuk, ada tekstil, ada macam-macam tadi itu. Pertanyaan saya Pak, data batu bara yang speknya sesuai dengan PLN itu kan hanya 247 dari 612 jadi masih sekitar sisa sekitar 370 atau 360 sekian juta yang ada, ada produk yang tidak sesuai dengan PLN. Kemudian jumlahnya yang nonlistrik pun juga yang non-PLN pun juga nggak begitu banyak cuma 19 juta. Pertanyaannya Pak, yang 370 yang punya

produksi yang tidak speknnya nggak sesuai dengan PLN itu DMO-nya yang nyeras siapa Pak, kalau dia tetap juga ada kewajiban DMO. Kan kewajiban DMO ini kan bagi semua pengusaha batu bara dan produsen batu bara atau kontraktor batu bara karena ini batu bara punya rakyat bukan produsen. Artinya semua kontraktor yang hidup di Indonesia ini kan diwajibkan untuk setor DMO 25% kan, betul kan Pak? Betul kan? Tapi kalau kemudian yang dibutuhkan itu hanya spek-spek tertentu DMO-nya kan berarti ada yang dia terus DMO-nya yang nyeras siapa yang nggak ada yang nyeras. Apakah kemudian yang kena DMO itu apakah hanya yang kebetulan speknnya cocok dengan industri dalam negeri atautkah semua yang tidak kena DMO itu juga yang speknnya nggak cocok itu juga kena DMO, tapi karena yang speknnya itu tidak kena DMO nggak ada yang nyeras DMO-nya adakah mekanisme ganti. Misal yang bersangkutan karena speknnya batu baranya tidak ada yang menyerap DMO-nya dalam negeri boleh tidak menggunakan DMO-nya semua silakan diekspor tetapi diperbolehkan nanti ganti, ganti ongkos toh kepada siapa begitu sama negara atau kepada siapa begitu. Ada nggak mekanisme seperti itu Pak. Mohon izin.

Terima kasih.

#### **SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Izin menanggapi

**Pak Dewan terhormat,**

Jadi, mengenai nggak terserap secara domestik ataupun nggak bisa diserap domestik untuk batu bara yang nggak sesuai spek benar Pak. Jadi, untuk ditanya tadi mengenai pemenuhan DMO kita bicara 25% terpenuhi apa nggak semuanya, otomatis nggak bisa semua pasti bisa terpenuhi Pak, karena DMO 25% berlaku untuk seluruh produksi batu bara, iya tanpa terkecuali. Jadi, perusahaan yang memproduksi mungkin kalori yang rendah pun 3 ribu gar dia harus komplain ke DMO. Padahal, nggak bisa diserap secara domestik misalnya seperti itu. Atau pun yang memproduksi *cooking coal* gitu yang 6 ribuan udah pasti dia nggak bisa *supply* ke PLN Pak karena nggak akan keserap. Nah, sekarang mekanismenya ada apa nggak Pak gitu yang ngatur itu, ada Pak, itu ada Kepmen 139 mengenai DMO. Di situ sudah jelas Pak, pemerintah mengakui dapat ditafsirkan secara *letter lux* jadi bahwa yang tidak memenuhi spek ataupun tidak mempunyai kontrak dengan DMO itu eh dengan produsen dalam negeri baik itu listrik ataupun industri itu ada sanksi Pak, sanksinya itu kompensasi, kompensasinya harus bayar ke negara. Berapa tarifnya, itu belum ada aturan turunannya Pak. Kira-kira itu jawabannya Pak. Oke tadi, ya jadi

#### **ANGGOTA KOMISI VI:**

Kalau tarif belum ada berarti belum ada yang bayar *dong*.

#### **SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Benar Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Terus ke mana? Ke mana uangnya dikemanain itu kalau belum ada.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi, aturan itu, aturannya itu Pak yang Kepmen 139 itu Agustus 2021 dan ini sekarang pemerintah lagi coba mengeluarkan Kepmen yang ngatur tarif kompensasi. Yang ada formula sanksinya itu adalah yang udah punya kontrak tapi nggak *perform* Pak. Jadi, misalnya anggaplah perusahaan saya udah berkontrak dengan PLN tapi saya nggak *perform*, malah saya jual ke luar negeri, nah ini sanksinya gimana, sanksinya itu adalah harga jual saya ke luar negeri itu dikurangi harga PLN nah itu yang harus dibayar ke negara Pak selisihnya.

Oke iya jadi, jadi itu tadi Pak kalau mau bicara kebutuhan PLN mengenai spek tadi itu ada yang pasti nggak bisa memenuhi, terus kemudian bicara volume, *demand*-nya lebih kecil daripada *supply*-nya sehingga pasti ada yang nggak keserap Pak kira-kira itu untuk yang kebutuhan.

Tadi nambahin yang Pak Hendra nanti Pak Anton ada tambahan untuk kebutuhan. Untuk kontribusi Pak, kontribusi tadi izin menanggapi terkait kontribusi batu bara. Kontribusi batu bara itu kalau kita bicara mengenai PNBPN Pak itu di data kita itu direalisasi PNBPN 2021 itu 75,16 triliun Pak, yang mana batu bara itu berkontribusi khusus batu bara ya Pak itu untuk minerba 75, batu bara itu berkontribusi 70 sampai 80% PNBPN minerba Pak.

Terus kemudian bagaimana kontribusi ke daerah. Nah, ini ada dana bagi hasil Pak. Jadi, data kita per sampai kuartal tiga tahun 2021 itu realisasi untuk kontribusi ke daerah itu sebesar 28,69 triliun itu kalau kontribusi ke daerah. Kemudian tadi sampaikan ada dipertanyakan juga mengenai kontribusi ke masyarakat gitu ya Pak ya. Jadi, ini secara ada aturannya bahwa kita industri ini ada, ada kewajiban Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pak, itu ada 8 pilar itu ada aturannya Kepmen ESDM-nya sendiri yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, keseimbangan komunitas, dan infrastruktur. Nah, kalau ditanya berapa realisasinya 2021 itu 900 sebentar 1,6 triliun Pak. Jadi, kalau di, di eh *sorry*, sampai kuartal di 2020 1,6 triliun sampai kuartal semester kuartal II 2021 itu 915 miliar. Jadi, itu kalau kontribusi nanti kita bicara ke masyarakat.

Terus kemudian, bisa lanjutnya, jadi kemudian mengenai pengawasan tadi Pak ada, ada pertanyaan atau pun klarifik, minta klarifikasi ke pengawasan DMO. Pengawasan seharusnya ada di SDM Pak di dalam hal ini minerba dan secara reguler itu ada rekonsiliasi Pak yang dilakukan oleh minerba. Nah, kalau untuk yang 2021 ini rekonsiliasinya ini sekarang lagi

dilakukan dari hari Selasa kemarin sampai hari Kamis besok, untuk beberapa si *perform* DMO di 2021, ini ada dilaksanakan di Jogja Pak. Itu untuk pengawasan, sehingga seharusnya bisa ketahuan siapa yang *perform* siapa nggak, tapi balik lagi Pak *performance* DMO ini pasti ada yang nggak *perform*, kenapa, karena yang nggak sesuai spek tadi itu misalnya.

Nah, kemudian bagaimana penerapan sanksinya, sanksinya udah diatur Pak di Kepmen 139. Jadi ini tinggal masalah implementasinya aja gitu apakah akan diimplementasi apa nggak gitu dan pemerintah sekarang ini akan mengimplementasikan. Mengenai oh tadi izin menanggapi juga Pak Pimpinan tadi mengenai larangan ekspor udah dibuka. Itu boleh kita sampaikan sampai detik ini ekspor itu belum dibuka Pak. Jadi, yang udah dibuka itu yang di media itu hanya khusus beberapa kapal yang sudah *complete loading* di pelabuhan lepas pantai atau pun pelabuhan batu bara, sisanya itu belum dibuka Pak, jadi sampai hari ini ekspor batu bara itu masih ditutup Pak, jadi kita belum bisa ekspor sampai sekarang.

Sejak tanggal 1 Januari Pak. Jadi kalau informasi di media yang bilang bahwa ini udah dibuka ekspor itu nggak benar Pak. Jadi dibuka khusus bukan dibuka kalau saya bilang, dilepas beberapa kapal yang udah *complete loading* nah itu dilepas iya, tapi sisa eksportnya belum dibuka Pak, kira-kira

**ANGGOTA KOMISI VI:**

(Tidak menggunakan mic).

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Nah kalau bicara legalitas yang udah kadung *loading* itu pasti milik *buyer* Pak, kenapa, ketentuannya itu biasanya kan FOB, FOB itu kepemilikan maupun resiko itu beralih ketika batu bara muat ke kapal.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Berasal darimana Pak?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Ya berasalnya tetap dari penjual Pak penjualnya kita, tapi secara legalitas kan Pak secara kontrak itu udah jadi miliknya *buyer* kita harusnya seperti itu.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Pak mungkin nanya Pak,  
Pak HPP itu berapa si Pak, lalu jual ke PLN dengan 70 USD per ton itu kan sudah untung dengan asumsi bayarnya tepat waktu gitu Pak ya.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

HP jadi gini Pak HBA, harga yang diatur itu kan HBA 70 maksimum untuk PLN. Jadi, itu HBA itu untuk me-refer ke kalori 6.322 Pak, 322 gar. Jadi, kalau batu baranya 4.700 misalnya itu ya di-adjust Pak. Nah, misalnya setelah di-adjust dengan HBA 70 jadi misalnya 41 dolar. Nah, kalau Bapak tanya harga berapa untung atau nggaknya bisa beda-beda masing-masing perusahaan Pak. Ada yang *case cost* produksinya itu bisa sampai 50-70 dolar, udah pasti nggak nutup Pak jual ke PLN. Mau dijual ya jual rugi mending tutup perusahaannya, tapi ada juga yang produksinya \$36 gitu, \$36 berarti kalau jual ke PLN 41 masih punya untung \$4 gitu. Atau ada yang produksi ya mungkin mepet-mepet \$40 gitu karena apa, masing-masing tambang itu punya tipikel geologinya yang berbeda-beda Pak, karena itu udah bawaannya tadi kita bicarakan ini dari, dari yang dari Allah ya ini udah *given* Pak. Jadi, ada yang punya kalau kita ngeruknya ya kita pakai istilahnya nisbaku pas Pak atau *striping* rasio, ada yang dia dapat batu bara satu matrik ton itu tapi harus galinya sampai 10 BCM tanah nah beda-beda. Makin besar SR-nya otomatis *cost*-nya makin gede Pak, kira-kira gitu. Terus kemudian mengenai.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Rata-rata ongkos per BCM itu berapa?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Ongkos per BCM bisa beda-beda Pak, jadi kembali tergantung daerahnya, tergantung nanti berapa, kapasitas kontraknya berapa lama, volumenya berapa banyak bisa beda-beda Pak. Kita nggak bisa bilang berapa gitu ya, tapi kalau mau ya asumsi aja mungkin sekitar \$1,1, \$1,3 per BCM *average*-nya ya kalau gitu.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Tadi itu HBA segitu itu kan untuk 6, 6 ribu berapa? 6.500 ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

6322 Pak HBA itu.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

6322 sementara kebutuhan terbesarnya PLN 4.500, 4.700 ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Kalau *waited average* ya dengan totalnya itu ya sekitar 4.600-4.700 *waited average* Pak ya kalorinya

**ANGGOTA KOMISI VI:**



Berarti PLN nyaris nggak pernah belanja sampai 7000, \$70 ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Nggak mungkin Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Nggak mungkin ya.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Nggak mungkin.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Oh iya.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Pak kalau rencana BLU yang diusung Pak Luhut itu solusi nggak Pak?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Kalau kita dari sisi asosiasi solusi Pak, solusi karena intinya gini tadi sempat Pak Pimpinan sampaikan lindung nilai. Kita dari awal sebenarnya menyetujui ada lindung nilai dalam bentuk pengaturan harga. Kita nggak ada masalah sebenarnya kalau ditentukan harga untuk khusus PLN ini karena kan untuk kepentingan umum Pak. Kita bicara tadi kita peduli untuk kepentingan umum ya kita peduli Pak, harus dibedakan harga oke kalau dibedakan harga, tapi yang permasalahannya adalah harga yang diatur sekarang untuk harga PLN itu hanya kep nya aja Pak, maksimum, begitu harga di bawah 70 HBA Pak orang perusahaan batu bara udah rugi berdarah-darah tetap harus *supply* dengan harga segitu. Kalau tadi bicara lindung nilai harusnya ada batas atas batas bawah Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Pak rencana iurannya berapa Pak per ton?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Iuran itu yang mana BLU Pak?

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Kenapa?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Yang BLU?

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Hooh.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

BLU itu sebenarnya tergantung market Pak, jadi kalau marketnya lagi selisihnya berapa tinggal dibagi dari produksi.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Bukan, iurannya itu loh iurannya nanti.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Betul Pak, jadi logikanya gini Pak ya logika BLU ini gini Pak. Jadi kita punya asumsi misalnya harga PLN itu kita bicara satu tahun ya Pak. Harga PLN itu kita anggap pukul rata \$40 sementara harga marketnya misalnya itu harga marketnya *let say* selisih \$10, \$50 jadi ada \$10 selisih harga market dengan harga yang harus dibeli PLN. Kebutuhan PLN di tahun 2022 misalnya 120 juta berarti \$10 dikali 120 juta berarti itu kurang lebih \$1,2 miliar yang selisih harus ditanggung PLN kalau harga ini dibikin harga market Pak, jadi PLN itu beli harga market, tapi kan PLN punya, cuma bisa mampu bayar kan \$40 tadi itu, 10-nya itu atau selisih 1,2 miliar tadi itu akan ditanggung oleh seluruh perusahaan batu bara sesuai produksinya. Kalau kita bicara produksi batu bara di tahun 2022 itu 650 juta berarti \$1,2 miliar tadi dibagi 650 juta nah itulah per matrik tonnya Pak, tapi itu kalau misalnya cuma selisih 10 Pak kalau bisa selisih lebih lagi ya bisa lebih gede lagi kurang lebih gitu Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Sesuai dengan harga speknnya masing-masing ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Betul Pak, jadi karena nanti itu pengurangannya selisihnya itu dilihat realisasi PLN berapa, karena kan PLN bisa beli yang 4.200, bisa beli 4.300 itu kan tadi kita cuma berasumsi kalau speknnya 4.700 tapi aktualnya kan bisa berbeda nanti Pak. Tapi intinya selisih itu ditanggung rata oleh seluruh perusahaan batu bara. Tadi kalau ditanya solusi permanen ya itu salah satu. Kemudian ada tadi sempat disampaikan Pak Pimpinan rapat *haggging* oh kita juga oke juga misalnya, misalnya ada harga *cap ceiling* ada harga *floor*-nya itu namanya *haggging* Pak, kalau nggak ada *floor*-nya bukan *haggging* namanya Pak kurang lebih begitu. Dan yang kejadian kan tahun 2020 gitu Pak *market*



hancur-hancuran semua orang berlomba-lomba mau jual PLN tapi ya nggak bisa keserap juga gitu kurang lebih gitu Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Menurut kesimpulannya menurut kalangan asosiasi ini para kontraktor batu bara ini kalau ada BLU itu solusi

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Betul Pak salah satu solusi.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Solusi di mata pengusaha, solusi untuk kepentingan PLN juga

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Solusi permanen betul Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Sama-sama enak gitu ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Iya.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Ya kalau memang baik kita dukung itu.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Karena PLN-nya kan nggak harus membayar lebih lagi. Kan isunya sekarang kan PLN nggak mau bayar lebih dari \$70 ini HBA 70 Pak *sorry*.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

BLU itu di Komisi VII.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

BLU kaya sawit Pak, ya kaya sawit persis. Jadi, negara nggak perlu subsidi lebih besar ke PLN gitu.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Uang BLU-nya dari mana?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Uang BLU-nya dibagi rata dari setiap produksi batu bara Pak jadi nanti kayak jadi kayak sebenarnya ini kayak mungkin dalam tanda kutip tambahan royaltilah ke perusahaan batu bara.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Ya itu bagi yang terdaftar, lalu yang

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Seluruh produksi Pak, jadi nanti kalau royalti ini kan selama ini kita bayarnya di muka sebelum dijual Pak. Saya mau kirim kapal ya saya harus bayar royalti dulu baru bisa kapalnya dikirim, nah ini sama Pak, gitu

**ANGGOTA KOMISI VI:**

(...) Terdaftar nggak?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Harusnya Pak kan itu kalau dia terdaftar di itu sistemnya minerba Pak SDM.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Pimpinan izin, Pimpinan boleh.

Kok yang di sebelah waktu rapat sebelah ada cewek yang disebut sama temennya Pak Nusron itu siapa itu katanya nggak terdaftar. Itu masuk asosiasi ini nggak? Kan ramai itu di Komisi VII kemarin. Ini masuk terdaftar di asosiasi nggak perusahaannya? Ya itulah.

**KETUA KOMITE MARKETING DAN LOGISTIK APBI (ANTON):**

Kita nggak Pak itu karena itu *trader* tapi ya seperti itu banyak Pak apa terjadi seperti itu karena memang kemudahan beli sebagai *trader*, menjual dia, dia men-*financing* biasanya menjual ekspor, nah itu ada Pak memang tapi bukan anggota kita itu.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Tapi nggak mungkin *dong* dia bisa ekspor tanpa lapor sama pemerintah kan?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Bisa Pak



**ANGGOTA KOMISI VI:**

Bisa?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Ada caranya Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Oh ada caranya ya udah oke sip itu penting itu.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Gimana caranya?

**KETUA RAPAT:**

Saya kira pendatang baru ini untuk tidak melakukan pertanyaan lagi

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Gimana itu caranya.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Pak Ketua izin untuk memastikan Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Gimana itu caranya.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Jadi nanti itu iurannya itu yang ditagih ke produsen yang punya tambang Pak ya, bukan ke *trader* ya?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Betul Pak, jadi itu per matrik ton produksi Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Hitung dari set on set tambang itu kan diset tambang itu kan

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Setiap mau jual akan dipotong itu konsep BLU Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Siap, siap oke. Mantap itu solusi itu.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

BLU tadi itu Pak selisih selisihnya, selisihnya tadi itu yang di ..(rekaman terputus).

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Dia bayar di depan itu Pak Dar ditalangi duluan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi, kawan-kawan karena masih ada lagi RDP dengan Asosiasi Pengusaha Sawit kita akan akhiri 10 menit lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan secara informatif sebagai bahan-bahan rapat kita nanti dalam Panja Energi maupun dengan,

**F-PG (DONI AKBAR, S.E.):**

Yang tadi Pimpinan belum dijawab.

Misalnya kan tadi dia minta kalori sedang kalau di luar sedang ini seandainya aja cuma kira-kira, memungkinkan tidak itu diolah supaya bisa digunakan oleh PLN, karena kan mereka PLN spesifikasinya khusus tuh minta yang sedang, dia nggak mau yang tinggi apalagi mau rendah dia mau yang ditengah-tengah itu.

**KETUA RAPAT:**

*Tranding* gitu ya

**F-PG (DONI AKBAR, S.E.):**

Iya memungkinkan tidak kalau itu digunakan, diolah sedemikian rupa.

**KETUA RAPAT:**

Jadi lebih rendah daripada kalori yang dibutuhkan PLN masih dimungkinkan nggak itu untuk dimanfaatkan.

**KETUA KOMITE MARKETING DAN LOGISTIK APBI (ANTON):**

Mungkin sama Pak tadi sebetulnya konsepnya PLN setiap IPP punya spek tersendiri dan sebetulnya awalnya PLNBB itu bertugas juga *blending* tidak hanya membeli dari *trader* tapi juga *blending*. Nah konsep ini sudah lama Pak sebetulnya saya yakin PLN punya *blue print* untuk supaya

bisa punya *blending facility* yang bisa distribusi hanya saya nggak tahu gimana sekarang prosesnya itu sebetulnya salah satu solusi untuk mengurangi perbedaan kalori sama perbedaan *demand* tadi. Mungkin itu Pak.

**F-PG (DONI AKBAR, S.E.):**

Jadi jawabannya memungkinkan ya.

**KETUA KOMITE MARKETING DAN LOGISTIK APBI (ANTON):**

Memungkinkan Pak sangat memungkinkan.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Satu lagi Pak itu Pimpinan.

K-nya kan khusus Pak ya, kekhususannya itu di mana UPK dengan yang ada khususnya itu apa semacam luasan area aja atau apakah itu juga nanti pengaruh juga ke urusan-urusan iuran, tarif-tarif itu.

Terima kasih Pak.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi IUP khusus itu ex PKP2B jadi *convert* ke UP Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Ketuanya APBI ke mana Pak?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Gimana Pak?

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Ketuanya APBI ke mana?

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Oh Pak Pandu masih di Amerika Pak sampai saat ini. Mohon izin tadi udah sampaikan tidak bisa menghadiri rapat ini Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

(Tidak pakai mic).

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Betul Pak.



## **KETUA RAPAT:**

Saya kira kita cukupkan teman-teman, hari ini kita banyak bicara dari sumber asosiasi pengusaha batu bara, yang untuk lebih memastikan bagaimana penetapan DMO batu bara ini tetap harus segera dipenuhi. Kami persilakan kalau kemarin di media disebutkan ada 418 perusahaan batu bara yang, yang 0 DMO kita harapkan ini secepatnya bagaimana asosiasi juga ikut memantau dan kalau toh tadi hari ini disampaikan, memang belum ada ekspor batu bara sampai hari ini ketentuannya masih berlaku, tentunya Komisi VI nanti akan melihat perkembangan setelah rapat Panja Energi dan mengundang PLN termasuk PLNBB mengenai ketersediaan batu bara untuk kepentingan PLN.

Intinya bahwa kita tetap akan mencari cara supaya pengendoran hal terkait dengan ekspor itu seperti apa setelah DMN batu bara ini DMO batu bara ini terpenuhi. Kalau tugas kita memang menjadi mitra dari PLN, ketersediaan pasokan batu bara yang tentunya sangat korelatif terhadap ketersediaan energi listrik buat rakyat. Mengenai hal-hal yang terkait dengan ekspor batu bara kita tetap akan terus pantau, terutama sekali hal-hal yang terkait sekali lagi pemenuhan DMO kewajiban badan usaha yang terkait dengan batu bara ini kapan menyerahkan sebagian hasil produksinya itu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dan kita akan terus memantau lewat termasuk memberikan *feeding-feeding* untuk segera ada keputusan-keputusan politik yang memang ada *win-win* dalam kaitan korporasi tapi dalam kaitan kepentingan rakyat kita memang lebih mengedepankan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan energi baik itu energi untuk, untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan industri nasional kita.

Sekali lagi saya tekankan bahwa mengenai kejadian ini kita bisa melihat bagaimana ketergantungan batu bara sebagai industri dasar untuk energi-energi di dunia maka saya berharap bagaimana cara berpikir kita mulai harus berubah bahwa terkait dengan masalah ekspor ini ternyata kita pun sebenarnya juga bisa berpikir lebih pada hilirisasi batu bara termasuk mengajak para industriawan-industriawan atau industri-industri di luar yang tentunya akan lebih nyaman kalau berinvestasi di negara kita karena ada jaminan pasokan-pasokan batu bara sebagai energi listrik untuk industri mereka. Ini yang saya kadang berpikir ya kalau mau tersedia ya *mbok* investasi ke sini, *mbok* mereka memindahkan pabriknya ke Indonesia, karena toh itu memberikan kemanfaatan buat industri mereka maupun kemanfaatan kita yang sekarang ini juga baru membuat suatu cara untuk hilirisasi dari berbagai sektor komoditas kita.

Demikian yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih atas kehadiran

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):**

Mas Bimo boleh satu menit nggak Mas Bimo, ada yang mau saya tanya satu Mas, karena berhubungan dengan Panja BUMN Energi boleh nggak Mas, satu menit aja Mas izin Mas boleh Mas?

**KETUA RAPAT:**

*Monggo.*

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):**

Mas saya mau nanya kami kan mau rapat Panja BUMN Energi. Salah satu isu yang akan kita bahas soal PLN Batu Bara, apakah PLN Batu Bara akan dilanjutkan atau di-stop atau ditutup. Nah, saya mau tanya sama Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia ini. Menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu apakah PLN Batu Bara itu membantu PLN dalam pengadaan atau tidak, karena setahu saya kan di asosiasi ini kan bukan hanya penambang ya, tapi PLN ini juga banyak dibantu oleh *trader* untuk memudahkan administrasi dan segala hal. Nah menurut asosiasi apakah PLN Batu Bara itu layak dipertahankan atau tidak, karena ini dasar bagi kami di Komisi VI untuk bicara dengan Menteri BUMN dan juga dengan PLN soal nasib PLN Batu Bara. Boleh berikan masukan ke kami soal PLN Batu Bara.

Terima kasih Pimpinan

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Untuk itu kita si intinya gini si Pak anggota Dewan yang terhormat,

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):**

Saya nama saya Andre Rosiade Mas.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Pak Andre Pak?

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):**

Hooh.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Gerindra.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Siap Pak.

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):**

Semua orang tahu Andre itu Gerindra. Lanjut.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Jadi intinya gini Pak, dari sisi kita si menurut kita sebaiknya dicari dulu sebenarnya yang nggak *perform supply* ke PLN itu siapa Pak. Nanti dari situ ya dari PLNBB nggak *perform* nanti dia kenapa nggak *perform* PLNBB misalnya.

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):**

Nggak sebentar, menurut informasi yang saya dapatkan ini coba meluruskan ya izin ya Pimpinan. PLNBB itu hanya men-*supply* 20% dari kebutuhan PLN itu satu, yang kedua ya PLNBB ini membantu PLN dalam rangka mengakomodasi penjualan batu bara melalui *trader*, karena kalau kontrak langsung kan PLN dengan penambang, dengan *trader* itu PLNBB karena PLN tidak mungkin berkontrak dengan *trader*. Nah, itu yang mau saya tanya. Apakah PLNBB ini perlu kita *cut* atau kita lanjutkan karena teman-teman sebagai asosiasi penambang batu bara tahu apakah PLNBB ini bermanfaat untuk PLN atau tidak, sebagai dasar kami rapat nanti dengan PLN maupun dengan Menteri BUMN.

Terima kasih.

**SEKJEN APBI (HARYANTO DAMANIK):**

Izin Pak Andre, jadi PLNBB nggak hanya mengambil dari *trader* batu bara aja tetapi termasuk juga dari si penambang atau produsen langsung. Nah, mengenai apakah itu masih bisa efisien apa efektif apa nggak untuk terkait masalah krisis di PLN mungkin menurut kita yang perlu evaluasi dulu kajian untuk lebih itu Pak sebelum bisa kita dari sisi kita itu, karena yang punya data itu kan sebenarnya PLN Pak kita nggak punya datanya Pak kira-kira gitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya saya kira cukup ya, kita berharap dari asosiasi ikut memantau walaupun pengawasan monitoring dari Kementerian ESDM, untuk mengawasi 418 perusahaan batu bara yang katanya belum setor DMO tolong itu diawasi Pak supaya kebutuhan PLN ini tidak berteriak kekurangan batu bara.

Di PLN sendiri kita nanti akan ada rapat. Di PLN sendiri kita akan evaluasi termasuk dari Andre tadi yang melihat apa yang sebenarnya menghambat pasokan ini dalam kondisi normal dan tentu dalam kondisi yang saya sebut abnormal karena harga liar tak terkendali di pasar luar. Kita tetap



berharap batu bara di Indonesia ini melimpah, sumber energi primer untuk listrik kita, PLN kita dan itu banyak dicari para pelaku bisnis yang tentunya kita ingin batu bara ini tetap menjadi modal dasar pembangunan nasional kita dalam pengertian yang luas dan kita harus berpikir bagaimana tetap memberikan nilai tambah dan membantu daya saing untuk hal-hal yang menyangkut pengembangan industri nasional kita.

Saya kira itu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dari para tamu undangan kita pada siang hari ini dan saya ucapkan terima kasih kawan-kawan yang telah mengikuti rapat yang hadir secara fisik maupun secara virtual dan pada Pimpinan Pak Hekal dan kawan-kawan juga saya ucapkan terima kasih.

Dengan demikian rapat saya akan tutup ini sebagai langkah awal dan mungkin kita pun juga akan masih mengundang untuk Asosiasi Pengusaha Batu Bara apabila hal-hal informasi lainnya masih kita perlukan. Mungkin juga dalam rapat-rapat kesempatan lain kami pun juga akan beri kesempatan kalau itu menyangkut informasi-informasi korporasi yang perlu tertutup kita pun akan selenggarakan dengan cara rapat tertutup, karena saya melihat sebenarnya masih ada data-data dan informasi yang bisa kami peroleh tapi karena ini rapat yang sifatnya terbuka mungkin belum terungkap hal-hal yang lain bisa dikirimkan lewat tertulis pada kami Komisi VI, semuanya untuk kebaikan kita semua, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan Badan Usaha Milik Negara, maupun juga untuk kepentingan kawan-kawan pengusaha batu bara.


Demikian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.51 WIB)**

Jakarta, 19 Januari 2022

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



DEWI RESMINI, S.E., M.Si.  
NIP. 197104071992032001